

LAPORAN KINERJA

—
2022



KEMENDIKBUDRISTEK
BPMP PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2022 dengan tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis/sasaran program/sasaran kegiatan beserta indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 menetapkan 2 (dua) sasaran dan 4 (empat) indikator kinerja. Secara umum Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022. Selain itu, tantangan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja juga dijabarkan, yang kemudian menjadi acuan dalam menetapkan strategi/inovasi kerja kedepannya.

Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022.



Ikhtisar Eksekutif

Laporan kinerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 menyajikan tingkat pencapaian 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022. Tingkat ketercapaian sasaran dan indikator kinerja kegiatan lebih rinci diuraikan pada BAB III Laporan ini.

Secara umum, capaian kinerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Target 2024
Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	0.98	7.15	3.92
Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	25	100	35.00
	Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	A	A	A
	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	83	98.91	85

Catatan : Dengan perbedaan sasaran dan indikator kinerja kegiatan dengan tahun sebelumnya, menyebabkan tidak dapat dibandingkannya capaian kinerja pada tahun 2021 dan 2022.

Realisasi Anggaran Tahun 2022

Sasaran Kegiatan	Indikator	Anggaran	Realisasi	% Kinerja	Sisa
Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	0	0	0	0
Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	Rp7.035.702.516	Rp7.035.702.516	99,78	Rp15.623.484
	Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	Rp375.000.000	Rp373,173,596	99,51	Rp1.826.404
	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	Rp10.092.046.000	Rp10.059.734.370	99,68	Rp32.311.630
	TOTAL		Rp17.518.372.000	99,72	Rp49.761.518

Kendala dan Solusi dalam upaya pencapaian target

Kendala

Transformasi UPT di Lingkungan Kemendikbudristek

Validitas data Guru pada pelaksanaan Survei Lingkungan Belajar

Jaringan listrik dan internet yang terbatas di Kabupaten/Kota

Rilis Rapor pendidikan tidak sesuai dengan linimasa perencanaan daerah



Solusi

Adaptasi kebijakan dan Koordinasi dengan Ditjen Paud dasmen

Pendampingan satuan pendidikan melalui pemerintah daerah menggunakan aplikasi Rapor Dapodik Kepulauan Riau

Berkolaborasi dengan Diskominfo melalui PMO

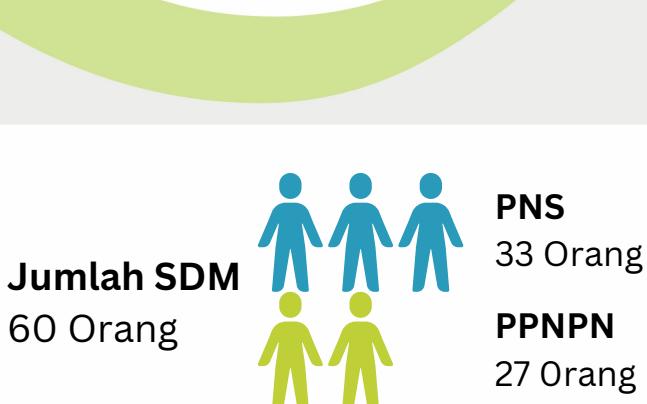
Menggunakan surat dari Menteri No. 16019/MPK.A/PR.07.00/2022 sebagai dasar perencanaan daerah dan advokasi pemerintah daerah dengan strategi Siput Gonggong

BAB I

Pendahuluan

A. Gambaran Umum

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau merupakan satuan kerja/Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau mulai melaksanakan tugas dan fungsi pada 21 Maret 2022.



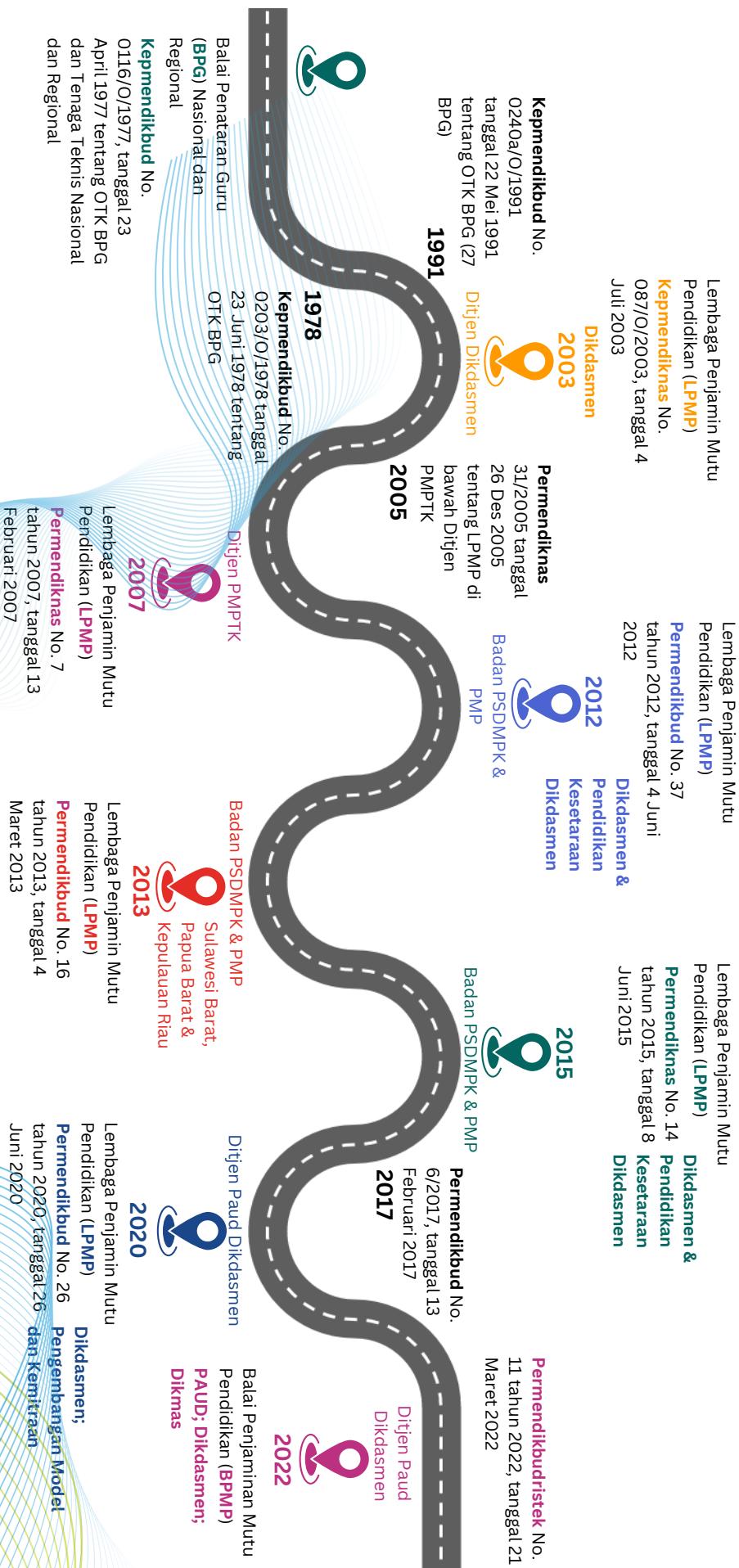
Struktur Organisasi



Wilayah kerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau melingkupi Satuan Pendidikan jenjang PAUD Dikmas, SD, SMP, SMA, dan SLB di 7 Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepulauan Riau



Linimasa: Transformasi BPMP



B. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
4. Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbudristek;
6. Permendikbudristek Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan
7. Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
8. Kemendikbudristek Nomor 263/O/2022 tentang Rincian Tugas Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.

C. Tugas dan Fungsi

Tugas:

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 tahun 2022, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat di provinsi

Fungsi:

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
2. pengembangan model penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
3. pelaksanaan supervisi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;
4. pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan mutu pendidikan;
5. pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
6. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat;
7. pelaksanaan urusan administrasi.



D. Isu-Isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi

Isu-isu Strategis

Tindak lanjut pelaksanaan program sekolah penggerak angkatan 1 oleh pemerintah daerah

Advokasi pengangkatan Guru Penggerak sebagai kepala sekolah

Peningkatan pemanfaatan PMM dan aktivitas komunitas belajar dalam sekolah

MiskONSEPSI Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila

Pemanfaatan Chromebook dan akun belajar.id dalam pembelajaran

Peningkatan Adopsi Platform SDS dan pengelolaan keuangan satuan pendidikan

Peran Strategis

Pendampingan Pemerintah daerah dalam melanjutkan Implementasi PSP Angkatan 1 dari sisi regulasi dan anggaran.

Kolaborasi antar UPT, mentoring sistem, dan kebijakan pengangkatan guru penggerak menjadi kepala sekolah

Advokasi pemanfaatan PMM dan optimalisasi peran komunitas belajar

Sosialisasi dan pendampingan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila kepada pemerintah daerah dan satuan pendidikan

Advokasi pemanfaatan Chromebook dan belajar.id dalam pembelajaran

Pendampingan pengelolaan keuangan satuan pendidikan melalui platform SDS

Isu-isu Strategis

Peran Strategis

Pemerintah daerah memiliki delta positif indeks SPM pendidikan

Satuan pendidikan memiliki delta positif pada capaian indikator prioritas rapor pendidikan

Pembangunan kerja sama dengan mitra pembangunan dalam pelaksanaan kebijakan merdeka belajar di daerah

Peningkatan partisipasi satuan pendidikan dalam pelaksanaan asesmen nasional dan survei lingkungan belajar

Konsistensi dan keberlanjutan penerapan ZI WBK

Pendampingan perencanaan daerah berdasarkan rapor pendidikan dan realisasi anggarannya untuk mencapai SPM

Pendampingan Pemerintah daerah dalam melanjutkan Implementasi PSP Angkatan 1 dari sisi regulasi dan anggaran.

Pengelolaan isu dalam implementasi Kebijakan Merdeka Belajar

Pendampingan Pemerintah daerah dalam melanjutkan Implementasi PSP Angkatan 1 dari sisi regulasi dan anggaran.

Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

BAB II

Perencanaan Kinerja

Sesuai Renstra Periode Tahun 2020-2024, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau menetapkan visi dan misi sebagai berikut:

Visi :

BPMP Provinsi Kepulauan Riau dalam mengembangkan amanat mendukung visi dan misi kementerian yang disusun berdasarkan pada capaian kinerja, potensi dan permasalahan, Visi Presiden pada RPJMN Tahun 2022-2024, serta Visi Indonesia 2045. Adapun Visi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 2022-2024 adalah “Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.”

Misi :

BPMP Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan Nawacita kedua arahan presiden (RPJMN) tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Provinsi Kepulauan Riau yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan dasar dan Pendidikan Menengah di Provinsi Kepulauan Riau.

Rencana Kinerja Jangka Menengah

Sepanjang 2022, terjadi perubahan nomenklatur berdasarkan Permendikbudristek Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja BBPMP dan BPMP tanggal 21 Maret 2022 yang mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kemendikbudristek, sehingga terjadi perubahan nomenklatur UPT di lingkungan PAUDDasmen, yaitu dari LPMP menjadi BPMP. Sesuai dengan perubahan nomenklatur tersebut, BPMP Prov. Kepulauan Riau menetapkan sasaran, indikator dan target selama lima tahun sebagai berikut.



Tabel Renstra Satker 2022-2024 (periode LPMP)

Uraian	Kategori	Target Perjanjian Kinerja 2022	Target Perjanjian Kinerja 2023	Target Perjanjian Kinerja 2024
		2022	2023	2024
1.0 Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	SK			
1.1 Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	IKK	25	30	35
2.0 Meningkatnya tata kelola Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	SK			
2.1 Predikat SAKIP Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	IKK	A	A	A
2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	IKK	83	84	85

Tabel Renstra Satker 2022-2024 (periode BPMP)

Uraian	Kategori	Target Perjanjian Kinerja 2022	Target Perjanjian Kinerja 2023	Target Perjanjian Kinerja 2024
		2022	2023	2024
1.0 Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	SK			
1.1 Presentase Satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	IKK	0.98	1.96	3.29
1.2 Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	IKK	25	30	35
2.0 Meningkatnya Tata Kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	SK			
2.1 Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	IKK	A	A	A
2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L BPMP Provinsi Kepulauan Riau	IKK	83	84	85

PURPOSE

TUJUAN STRATEGIS

Semula			Menjadi		
Tujuan	Indikator kinerja tujuan	Target 2024	Tujuan	Indikator kinerja tujuan	Target 2024
Meningkatnya Mutu satuan pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah	Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	25 %	Meningkatnya kualitas dan kemanfaatan hasil asesmen untuk praktik pembelajaran	Percentase satuan pendidikan yang memanfaatkan profil dan rapor pendidikan untuk mendukung perbaikan pembelajaran	75 %
Terwujudnya tata Kelola LPMP Provinsi Kepulauan Riau yang berkualitas	Predikat SAKIP LPMP Provinsi Kepulauan Riau	A	Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran di Lingkungan BPMP Provinsi Kepulauan Riau	Predikat SAKIP BPMP Provinsi Kepulauan Riau	A

Sebagai upaya untuk mewujudkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana Stratgis Tahun 2020-2024, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau merumuskan kinerja yang akan dicapai di tahun 2022, dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja Awal

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	25
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	<p>[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau</p>	A 83

Kode 2005

Nama Kegiatan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Anggaran
Rp10.646.565.000

Kode 6397

Nama Kegiatan
Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas

Anggaran
Rp6.040.103.000



Perjanjian Kinerja Akhir

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya [IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	0,98 25
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau [IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	A 83
Kode 2005 Nama Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Anggaran Rp10.467.046.000	Kode 6397 Nama Kegiatan Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas Anggaran Rp7.414.915.000	

Pada Revisi Perjanjian Kinerja ini, memuat indikator kinerja kegiatan dengan sasaran tambahan dari jenjang PAUD Dikmas, yang hingga bulan Juni 2022 sudah difasilitasi oleh BP PAUD DIKMAS Riau, sehingga BPMP Provinsi Kepulauan Riau hanya akan melakukan perhitungan capaian akhir tahun 2022 sesuai hasil perhitungan yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Kurikulum Asesmen Pendidikan (BSKAP).

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2022, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau menetapkan 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja, dengan tingkat ketercapaian sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	Persentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	0.98	7.15	729.59
Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	25	100	400
	Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	A	A	100
	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	83	98.91	119.17

Sasaran kinerja dan indikator kinerja kegiatan pada tahun 2022 ini berbeda dengan tahun 2021, seperti pada tabel berikut:

2021		2022		
Sasaran Kegiatan (SK) / Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian 2021	Sasaran Kegiatan (SK) / Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2022	Capaian 2022
SK1. Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan		SK1. Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen		
IKK 1.1 Presentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75	37,7 %	IKK 1.1 Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya di Provinsi Kepulauan Riau	0,98 %	7.15 %
IKK 1.2 Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	1,73 %	IKK 1.2 Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	25 %	100 %
IKK 1.3 Persentase kab/kota yang data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan	100 %			
SK2. Meningkatnya tata kelola Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau		SK2. Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau		
IKK 2.1 Predikat SAKIP Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	A	IKK 2.1 Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	A	A
IKK 2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	96,91	IKK 2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	83	98.91

Dengan perbedaan sasaran dan indikator kinerja kegiatan di atas, menyebabkan tidak dapat dibandingkannya capaian kinerja pada tahun 2021 dan 2022.

Pada tahun 2021 capaian kinerja diukur melalui hasil rapor mutu yang diperoleh dari pengisian instrumen evaluasi diri sekolah pada platform EDS (Evaluasi Diri Sekolah). Sedangkan pada tahun 2022 capaian kinerja diukur melalui Profil Pendidikan yang merupakan laporan komprehensif mengenai layanan pendidikan sebagai hasil dari evaluasi sistem pendidikan yang digunakan sebagai landasan untuk peningkatan mutu layanan pendidikan dan penetapan Rapor Pendidikan. Profil Pendidikan diolah berdasarkan data dari hasil Asesmen Nasional, Data Pokok Pendidikan (Dapodik), Platform digital guru dan kepala sekolah, Data Pendidikan Kemenag, Tracer Study SMK, Data GTK, BPS, dll.

Rapor Pendidikan tahun 2022 belum dirilis oleh Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), oleh karena itu untuk mengukur capaian kinerja tahun 2022 digunakan data hasil akreditasi sekolah/madrasah dan akreditasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal. Data akreditasi dijadikan dasar dalam pengukuran capaian kinerja karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan mewajibkan akreditasi bagi seluruh sekolah/madrasah sebagai bagian dari upaya penjaminan mutu pendidikan. Oleh karena itu, akreditasi merupakan proses evaluasi terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan dalam upaya menjamin terselenggaranya layanan pendidikan bermutu.

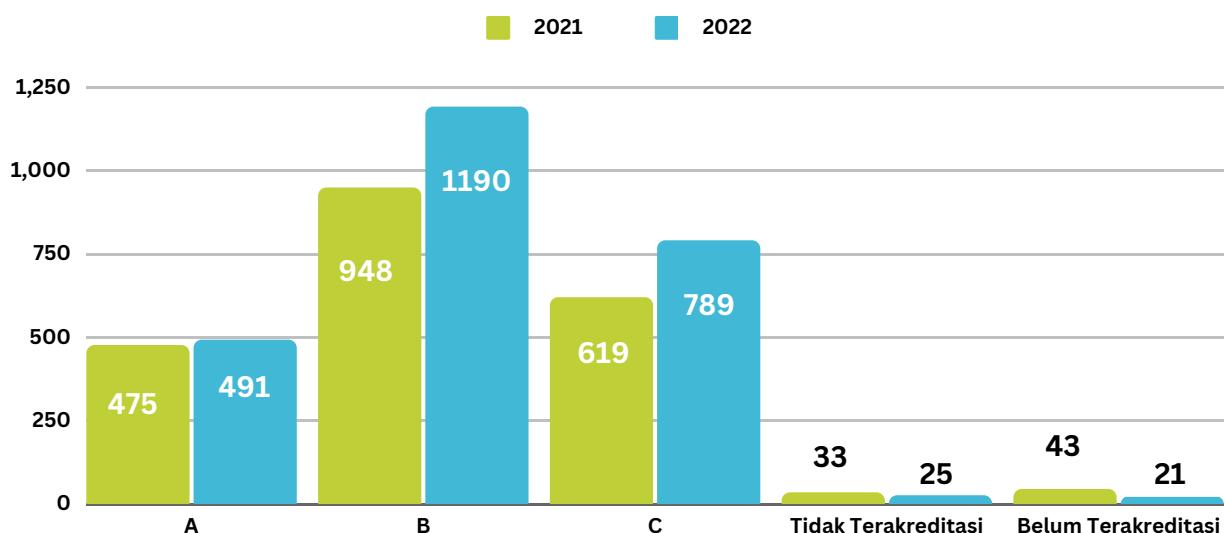
Sasaran Kegiatan 1

Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen

Salah satu alat ukur ketercapaian sasaran 1 adalah melalui perbandingan nilai masing-masing satuan pendidikan yang memiliki mutu pembelajaran lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya berdasarkan data akreditasi 2021-2022 yang bersumber dari data BAN S/M, BAN PAUD dan Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan.

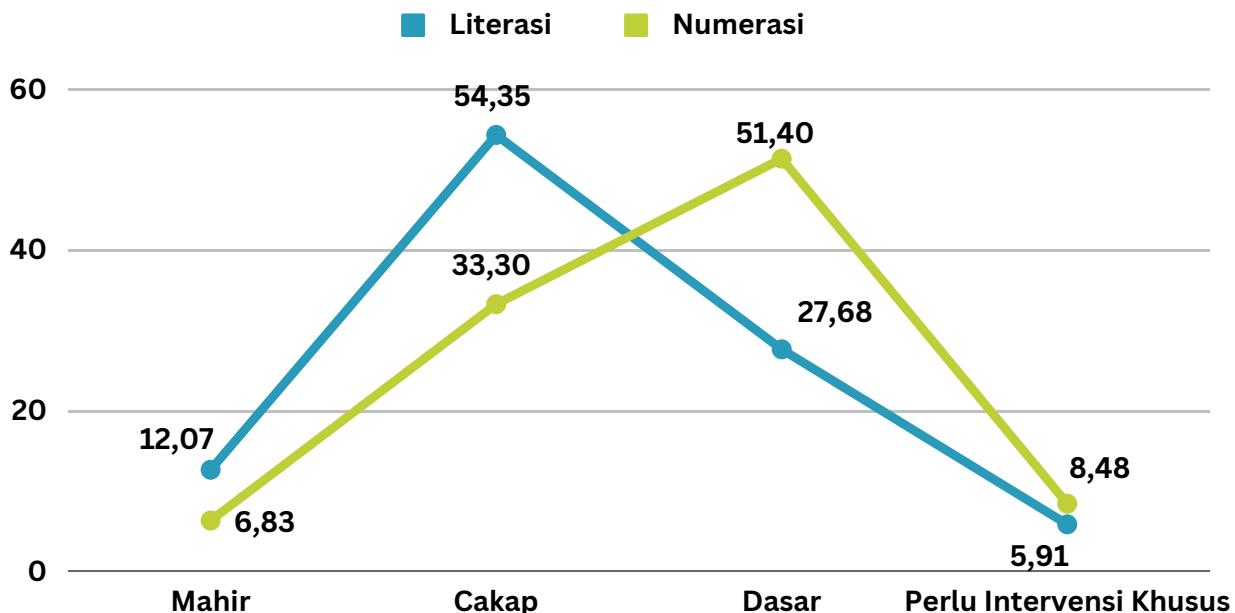
Selain dari hasil akreditasi, mutu pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dari capaian hasil Asesmen Nasional pada Rapor Pendidikan. Namun saat ini data yang tersedia baru capaian tahun 2021, sedangkan untuk capaian tahun 2022 belum dirilis oleh BSKAP.

Capaian Akreditasi jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen Tahun 2021 dan 2022



Sumber : Data Akreditasi berdasarkan cut off Dapodik Semester Ganjil (Desember)

Capaian Literasi dan Numerasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 (%)



Sumber : Profil Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

Indikator Kinerja Kegiatan 1.1

Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya

Indikator Kinerja Kegiatan 1.1 merupakan persentase dari satuan PAUD dan Dikmas di wilayah masing masing yang memiliki mutu pembelajaran lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya berdasarkan hasil rapor pendidikan atau survei lingkungan belajar.

Pada Januari hingga Juni 2022 Program, kegiatan dan anggaran yang mendukung pencapaian target telah dilaksanakan oleh BP PAUD dan Dikmas Provinsi Riau selaku unit pelaksana teknis yang membidangi PAUD dan Dikmas di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. BPMP Provinsi Kepulauan Riau melakukan pendampingan terkait program kebijakan di bidang PAUD dan Dikmas di Provinsi Kepulauan Riau mulai Juli 2022.

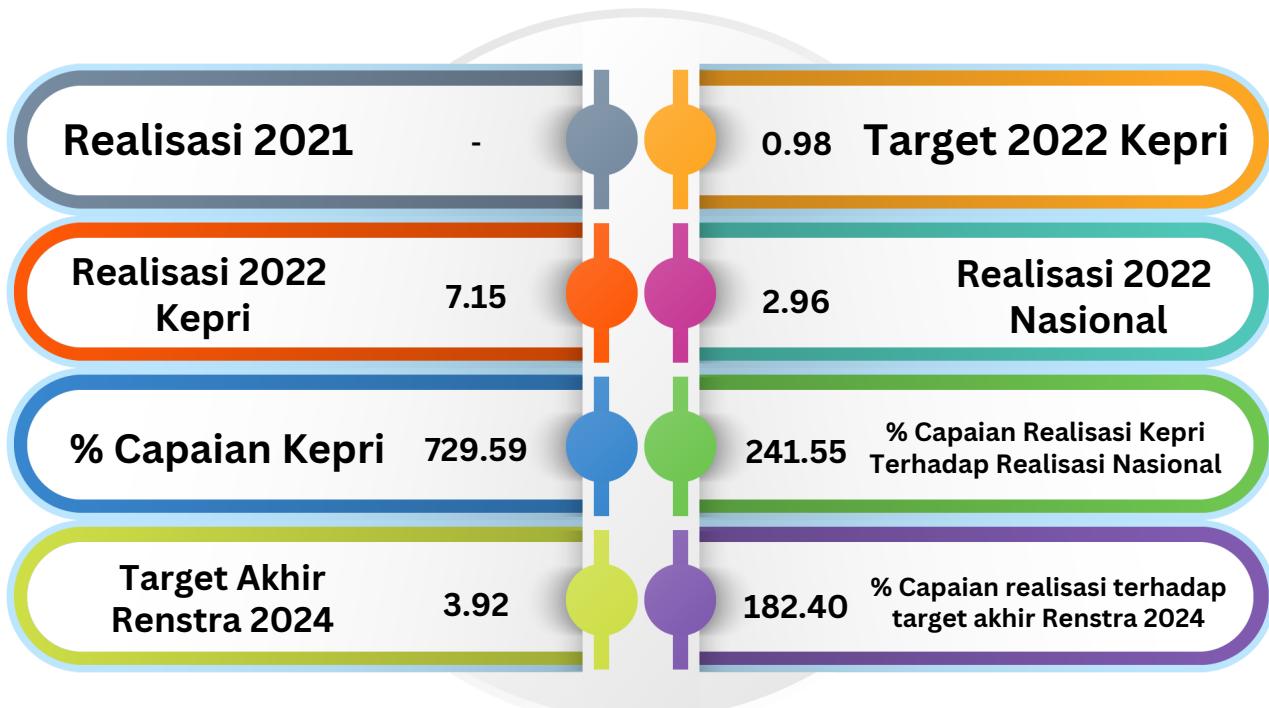
Cara perhitungan Indikator Kinerja

$$IKK \text{ 2.2.7.11 } (\Delta) = \frac{(0,5 \times A_{22}) + (0,35 \times B_{22}) + (0,15 \times C_{22})}{\text{total sekolah TA 2022}} - \frac{(0,5 \times A_{21}) + (0,35 \times B_{21}) + (0,15 \times C_{21})}{\text{total sekolah TA 2021}}$$

Keterangan :

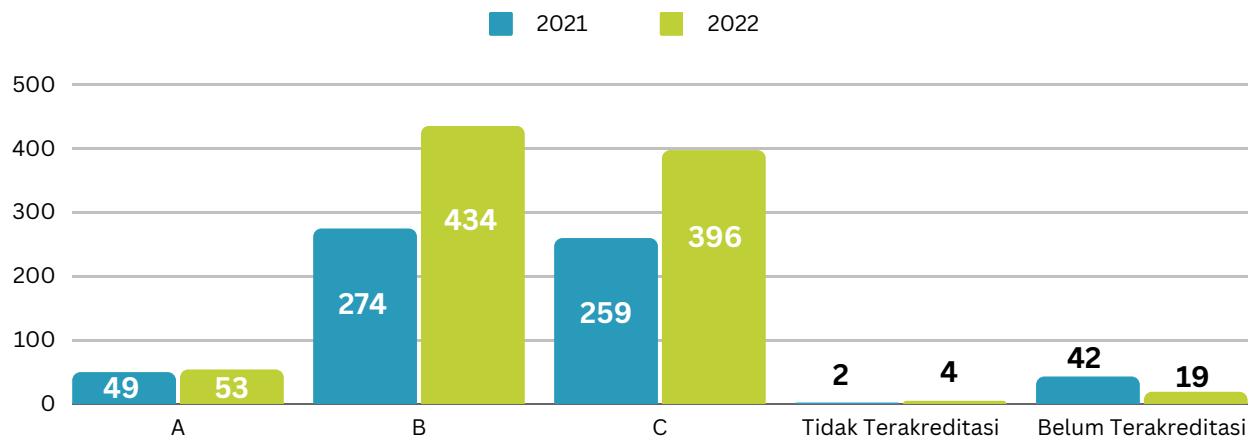
1. Δ : Persentase kenaikan mutu pembelajaran TA 2021 ke TA 2022 yang dilihat dari nilai akreditasi
2. A_{22} : Jumlah Sekolah dengan nilai akreditasi A di tahun 2022
3. B_{22} : Jumlah Sekolah dengan nilai akreditasi B di tahun 2022
4. C_{22} : Jumlah Sekolah dengan nilai akreditasi C di tahun 2022
5. A_{21} : Jumlah Sekolah dengan nilai akreditasi A di tahun 2021
6. B_{21} : Jumlah Sekolah dengan nilai akreditasi B di tahun 2021
7. C_{21} : Jumlah Sekolah dengan nilai akreditasi C di tahun 2021

Perbandingan target dan realisasi tahun berjalan beserta penjelasan Indikator Kinerja Kegiatan 1.1.



Catatan : Dengan perbedaan sasaran dan indikator kinerja kegiatan, menyebabkan tidak dapat dibandingkannya capaian kinerja pada tahun 2021 dan 2022.

Capaian Akreditasi jenjang PAUD dan Dikmas Tahun 2021 dan 2022



*sumber : Data Akreditasi berdasarkan cut off
Dapodik Semester Ganjil (Desember)*

catatan

Capaian hasil belajar PAUD berdasarkan Profil Pendidikan belum tersedia karena survei lingkungan belajar di jenjang PAUD belum dilaksanakan

Indikator Kinerja Kegiatan 1.2

Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)

Indikator Kinerja Kegiatan 1.2 merupakan Persentase dari provinsi / kabupaten / kota di wilayah masing masing yang memiliki Rapor Pendidikan lebih tinggi dibandingkan Rapor Pendidikan tahun sebelumnya.

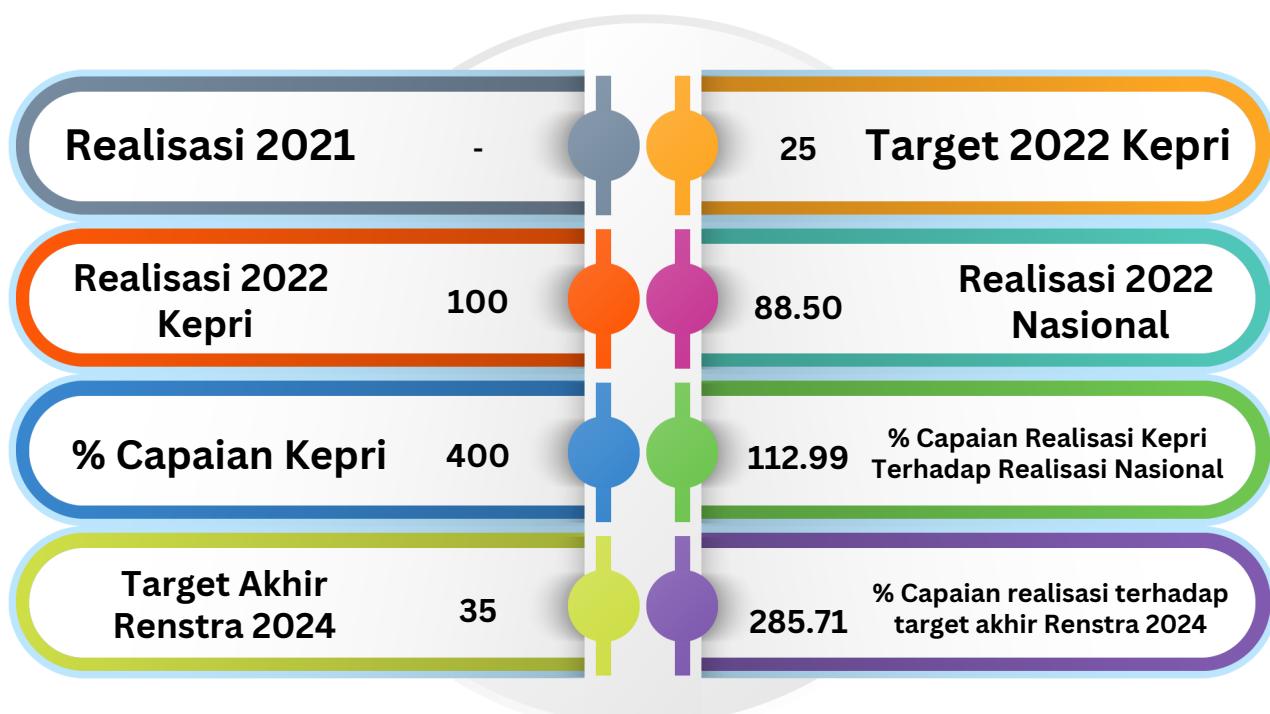
Cara perhitungan Indikator Kinerja

$$IKK2.2.7.12 = \sum_{i=1}^n flag(\Delta_i)$$

Keterangan :

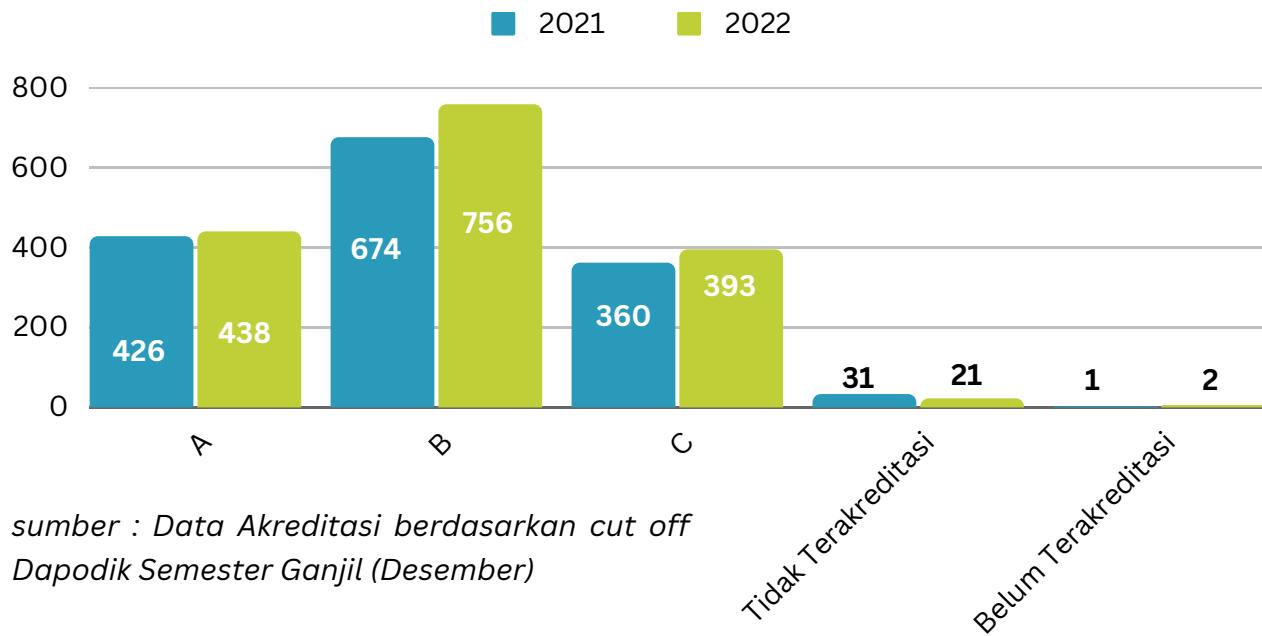
1. i : Jumlah Prov/Kab/Kota di BPMP/BBPMP bersangkutan
2. $flag(\Delta_i)$: Jumlah Prov/Kab/Kota di BPMP/BBPMP yang mengalami kenaikan mutu pembelajaran

Perbandingan target dan realisasi tahun berjalan beserta penjelasan Indikator Kinerja Kegiatan 1.2.

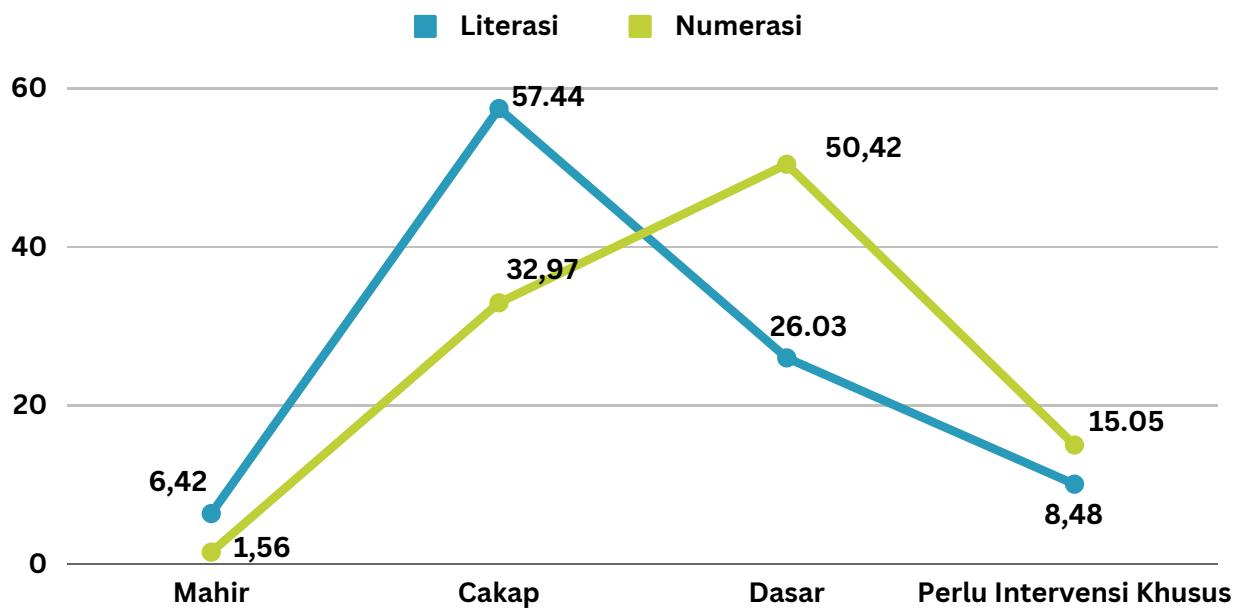


Catatan : Dengan perbedaan sasaran dan indikator kinerja kegiatan, menyebabkan tidak dapat dibandingkannya capaian kinerja pada tahun 2021 dan 2022.

Capaian Akreditasi jenjang Dikdas dan Dikmen Tahun 2021 dan 2022



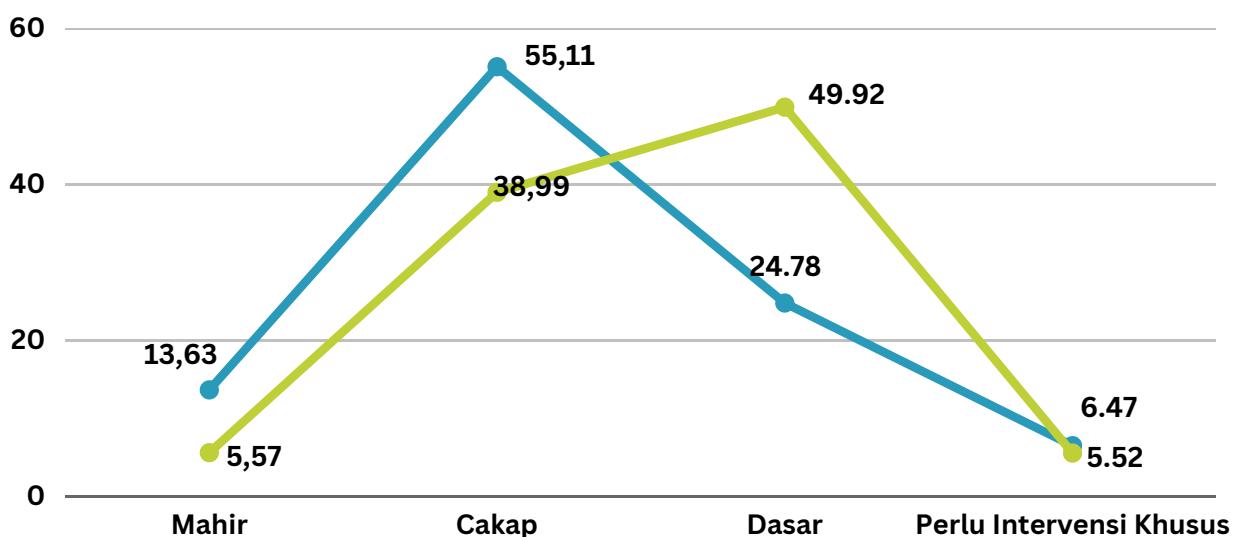
Capaian Literasi dan Numerasi Provinsi Kepulauan Riau Jenjang SD Tahun 2021 (%)



Capaian Literasi dan Numerasi Provinsi Kepulauan Riau Jenjang SMP

Tahun 2021 (%)

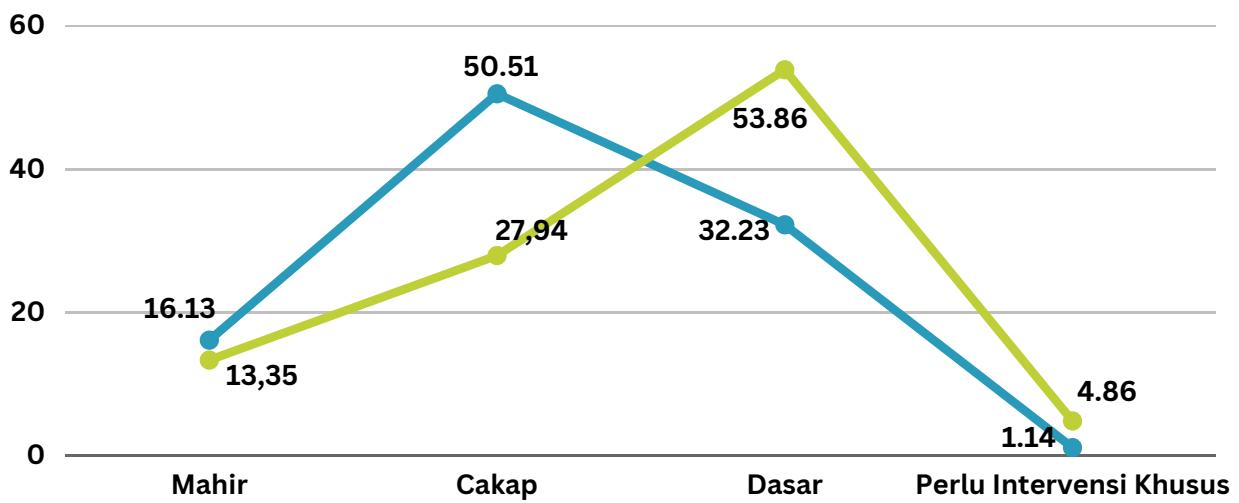
Literasi Numerasi



Capaian Literasi dan Numerasi Provinsi Kepulauan Riau Jenjang SMA

Tahun 2021 (%)

Literasi Numerasi



Besaran alokasi anggaran untuk mencapai target Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen) sebesar 25%. BPMP Provinsi Kepulauan Riau mengambil baseline anggaran Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya pada program dukungan manajemen Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran, dengan realisasi sebagai berikut:



**Realisasi Anggaran
99,78%**

PROGRAM KEGIATAN PENDUKUNG PEREALISASI TARGET

Program Sekolah Penggerak

Implementasi Kurikulum Merdeka

Asesmen Nasional

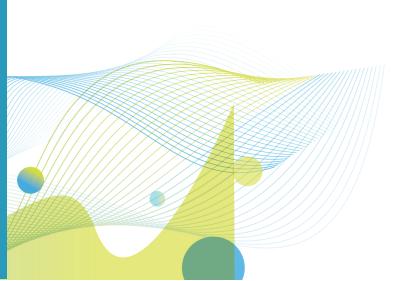
Dana Transfer Daerah

Perencanaan Berbasis Data

Dapodik

Penjarigan Mitra Pembangunan

**IKK. 1.1
& 1.2**



1. PROGRAM SEKOLAH PENGERAK

Dampak

Peran

Melakukan **sosialisasi, fasilitasi pendaftaran, pendampingan** Dinas Pendidikan dan Pemerintah Daerah melalui PMO

Prov. Kepri



Menyediakan anggaran pendukung pelaksanaan Program Sekolah Penggerak untuk sekolah pelaksana angkatan 1 jenjang SMA dan SLB dalam bentuk dana hibah melalui APBD Perubahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022

Kabupaten
Kep. Anambas



Menyediakan anggaran pendukung pelaksanaan Program Sekolah Penggerak untuk sekolah pelaksana angkatan 3 jenjang PAUD, SD, dan SMP melalui anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023

Kota Batam



Mengeluarkan kebijakan tentang pemberian prioritas pemenuhan kebutuhan guru dan kebutuhan sarana dan prasarana pada sekolah pelaksana program sekolah penggerak;

Kab. Natuna



Mengalokasikan anggaran untuk pendukung pelaksanaan program sekolah penggerak tahun 2022 melalui pembebasan lahan TK Negeri 2 Bunguran Timur tahun 2022, kemudian direncanakan penambahan RKB tahun 2024 melalui rencana kerja Dinas Pendidikan;

5 dari 8 kabupaten/kota

Memiliki **peraturan daerah** yang memuat dan mengatur tentang penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak di daerah

1. **Peraturan Gubernur** Kepulauan Riau Nomor 35/2022 tentang Program Sekolah Penggerak pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Kepulauan Riau ;
2. **Peraturan Daerah Kabupaten Natuna** 3/2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang dimuat dalam pasal Implementasi Merdeka Belajar Psl. 121-123 (PGP); Psl. 132-135 (PSP); Psl. 136-137 (AN);
3. **Peraturan Walikota Batam** nomor 168/2022 tentang Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka;
4. **Peraturan Bupati Karimun** nomor 70/2022 tentang Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Program Guru Penggerak;
5. **Peraturan Bupati Kepulauan Anambas** 46/2022 tentang Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Program Guru Penggerak, dan Perencanaan Berbasis Data;

Kendala

1. PROGRAM SEKOLAH PENGERAK

Solusi

Keterbatasan koordinasi dengan bidang PAUD dan Dikmas karena selama ini berada di bawah binaan BP PAUD dan Dikmas Provinsi Riau



Membangun koordinasi dengan bidang PAUD dan Dikmas di masing-masing Kab/Kota

Sinergitas dan pemahaman antara BPMP, BGP, dan Dinas Pendidikan yang masih beragam;



Melaksanakan rapat pra **PMO** dan **PMO Level Daerah** secara rutin



Mengadvokasi pengalokasian dana penyelenggaraan program PSP pengganti dana BOS Kinerja TK Islam Al-Misbah ke Direktorat PAUD



Perubahan SOTK pada Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota yang berdampak pada perubahan tim PMO

Mendorong penerbitan peraturan daerah sebagai dasar penyediaan anggaran pendukung program/kebijakan merdeka belajar khususnya Program Sekolah Penggerak



Dokumentasi Rapat Pokja Manajemen Operasional rutin setiap bulan

2. IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA

Dampak



Terbentuknya 127 komunitas belajar untuk jenjang PAUD dan Dikmas di kepulauan Riau



Peran

Melakukan **Koordinasi, Sosialisasi dan Fasilitasi** terkait kebijakan, pendaftaran, 6 strategi Implementasi Kurikulum merdeka kepada pemerintah daerah



Pemerintah daerah melakukan pemantauan belajar guru pada PMM melalui dasbor Dinas Pendidikan. Saat ini Dinas Pendidikan yang telah membuat dasbor pemantauan belajar guru melalui PMM adalah:

- Dinas Pendidikan Kota Batam,
- Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas,
- Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang.



Memberikan pembekalan teknis dalam pengelolaan dan pemberdayaan komunitas belajar kepada 174 komunitas belajar se-Kepulauan Riau dan 8 penanggungjawab komunitas belajar di Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota se-Kepulauan Riau

adoption rate PMM 100% dan penyelesaian progress belajar guru melalui PMM hingga 4 topik dengan persentase 85%



Terbitnya 3 peraturan daerah yang mengatur dan memuat tentang implementasi kurikulum merdeka yaitu Kota Batam, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Kendala

Masih terdapat sekolah yang salah memilih jalur mandiri;



Data dasbor pemantauan aktivitas belajar guru melalui PMM tidak akurat;



Kesulitan jaringan internet sebagai dukungan akses terhadap PMM;



Tingkat pemahaman terhadap asesmen awal/diagnostik dan penyusunan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) yang belum terukur;



Tidak ada dukungan anggaran dari Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan kurikulum merdeka jalur mandiri, sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan oleh daerah.



Membuat grup whatsapp PMO Kepri yang beranggotakan seluruh tim PMO Kabupaten/Kota/Provinsi sebagai wadah komunikasi, penyebaran informasi, dan berbagi praktik baik;

mensosialisasikan tautan survei perubahan pilihan jalur mandiri;

mendorong Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk membuat dasbor pemantauan aktivitas belajar guru melalui PMM;

menjembatani penyelesaian kendala jaringan internet dengan melibatkan Dinas Kominfo Kabupaten/Kota dalam rapat PMO Level Daerah;

Melakukan pengukuran pemahaman sekolah terhadap kurikulum merdeka dan aktivitas komunitas belajar yang dapat diakses melalui https://s.id/kepri_ikm;



Melakukan pemantauan secara berkala terhadap progress belajar pada PMM sesuai dengan dashboard pusat dan menyampaikan informasinya pada grup whatsapp PMO Kepri;

2. IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA



BPMP Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan **Pemberdayaan Komunitas Belajar se-Kepri** dalam Akselerasi Peningkatan Mutu Pembelajaran Melalui Digitalisasi Sekolah.



Advokasi dan sosialisasi pedoman **peningkatan kompetensi literasi dan numerasi** melalui optimalisasi peran komunitas belajar (Batch 3)



Bimbingan teknis dan **penguatan pembelajaran dengan paradigma baru** ke Pemda



Advokasi dan sosialisasi pedoman **peningkatan kompetensi literasi dan numerasi** melalui optimalisasi peran komunitas belajar (Batch 3)

3. ASESMEN NASIONAL

Peran

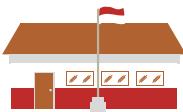
Melakukan Koordinasi dan Pendampingan kepada pemerintah daerah terkait dengan persiapan pelaksanaan Asesmen Nasional serta melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Asesmen Nasional di Satuan Pendidikan

Dampak

Kab. Natuna



Menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna 3/2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang memuat pasal terkait pelaksanaan Asesmen Nasional Psl. 136-137



satuan pendidikan **melaksanakan AN sesuai POS AN** sehingga hasil AN menggambarkan kondisi sebenarnya

Kendala

Jaringan internet yang belum merata di semua wilayah/blank spot



Menyarankan satuan pendidikan yang berada di area blank spot untuk **menumpang ke satuan pendidikan lain**

berkoordinasi dengan dinas komunikasi dan informatika terkait kendala jaringan internet



Pelaksanaan Asesmen Nasional jenjang SD di Kabupaten Bintan



Pelaksanaan Asesmen Nasional jenjang SMA di Kota Batam

4. DANA TRANSFER DAERAH

Dampak



Tersediaanya **informasi kualitatif** implementasi DAK fisik dan non fisik (BOS dan BOP)



Implementasi DAK fisik dan non fisik yang **sesuai dengan juknis**

Kendala

Keterbatasan koordinasi dengan bidang PAUD dan Dikmas karena selama ini bidang PAUD dan Dikmas berada dibawah binaan BP PAUD dan Dikmas Provinsi Riau



Solusi

Membangun koordinasi dengan bidang PAUD dan Dikmas di masing-masing Kab/Kota



Pendampingan Pelaksanaan Sosialisasi Dana Alokasi Khusus (DAK)



Pendampingan Penyusunan Laporan Dana Alokasi Khusus (DAK)

5. PERENCANAAN BERBASIS DATA

Peran

Sosialisasi

Melakukan Perencanaan Berbasis Data, **Bimtek** Platform Rapor Pendidikan, dan **Pendampingan** Perencanaan Kebijakan, Perencanaan Berbasis Data, dan Rencana Perbaikan

Dampak

Kabupaten
Kep. Anambas



Menerbitkan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas 46/2022 tentang Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Program Guru Penggerak, dan Perencanaan Berbasis Data



Pemanfaatan profil pendidikan dalam perencanaan daerah

Kendala

Hasil profil pendidikan tahun 2021 baru keluar setelah proses perencanaan di pemda berjalan



Menggunakan Surat Mendikburistek No. 16019/MPK.A/PR.07.00/2022 hal indikator kinerja urusan pendidikan kabupaten/kota tanggal 7 Maret 2022 sebagai dasar dalam perencanaan pemerintah daerah

Pemahaman pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam pemanfaatan profil pendidikan masih kurang

Mengembangkan aplikasi Cek Mutu Pendidikan Daerah Kepulauan Riau (CEMPEDAK) untuk memperoleh rekomendasi kegiatan dari hasil profil pendidikan daerah



Melakukan pendampingan agar satuan pendidikan memanfaatkan lembar rekemendasi yang dapat diunduh pada platform rapor pendidikan



6. DATA POKOK PENDIDIKAN

Dampak



Peningkatan progres pemutakhiran data Dapodik dari 83% menjadi 98%



Menutup satuan pendidikan yang sudah tidak aktif dari Dapodik

Kendala

Tidak ada juknis terkait pendampingan pengelolaan DAPODIK dari pusat



Solusi

Berkoordinasi dengan Pusat dan Pemerintah Daerah terkait time line pengelolaan Dapodik



Pendampingan kepada dinas pendidikan terkait peningkatan kualitas dapodik dan kompetensi pengelola dapodik



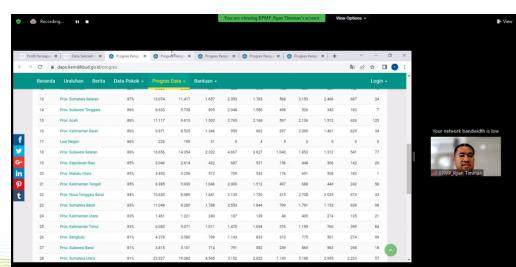
Mengembangkan aplikasi rapor dapodik untuk mendeteksi tingkat kualitas data pokok pendidikan



Melakukan FGD dengan disdik kab/kota utk mendampingi satuan pendidikan yang belum melakukan sinkronisasi dan menutup satuan pendidikan yang tidak aktif



Pendampingan Pengumpulan Data Pokok Pendidikan (Verifikasi Data Sinkronisasi Dapodik)



Sosialisasi Formulir, Prosedur dan Aplikasi Dapodik (Percepatan Sinkronisasi Dapodik) Secara Daring

- ## Peran
1. Melakukan sosialisasi formulir, prosedur dan aplikasi Dapodik;
 2. Melakukan Uji Petik Dapodik;
 3. Melakukan Pendampingan Pengumpulan Data Dapodik;
 4. Melakukan Evaluasi tindak lanjut hasil kualitas data.

7 PENJARINGAN MITRA PEMBANGUNAN

Peran

Melakukan sosialisasi kebijakan kemendikbudristek kepada mitra pembangunan, dan memetakan potensi kemitraan

Dampak



Terpetakannya **potensi kemitraan** BPMP Provinsi Kepulauan Riau

Kendala

Pelaksanaan program kemitraan yang
kurang sesuai dengan timeline
perencanaan mitra pembangunan

Solusi



Menyusun program kemitraan di awal tahun.



Kunjungan ke Bintan Resort Cakrawala di Kabupaten Bintan



Kunjungan ke Dinas Perpustakaan Provinsi Kepri



Kunjungan ke Dinas Perpustakaan Kota Tanjungpinang

FAKTOR PENYEBAB KEBERHASILAN PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA



Siput Gonggong



Cempedak



Rapor Dapodik

Siput Gonggong

Strategi implementasi peningkatan mutu pendidikan secara bergotong royong (siput gonggong) merupakan strategi advokasi kepada pemerintah daerah melalui enam tahapan.

Cempedak

Aplikasi yang mengintegrasikan Profil dan Rapor Pendidikan dengan indikator kinerja urusan pendidikan pada Standar pelayanan minimal pemerintah daerah berdasarkan Permendagri 59 tahun 2021 beserta rekemendasi kegiatan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021.

Rapor Dapodik

Aplikasi Rapor Dapodik merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk membantu pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam mengidentifikasi kualitas data pokok pendidikan. Aplikasi ini merupakan pengembangan dari aplikasi rapor dapodik yang dikembangkan oleh pusat, dengan menambahkan berbagai fitur sehingga dapat diakses oleh pemerintah daerah dan satuan pendidikan detail sampai capaian nilai per butir indikator. Sehingga dapat ditindaklanjuti untuk ditingkatkan kualitas datanya dengan memperbaiki capaian indikator yang masih rendah.

1. Strategi implementasi peningkatan mutu pendidikan secara bergotong royong (**Siput Gonggong**)



Implementasi stategi “Siput Gonggong” telah memberikan dampak berupa penetapan kebijakan/regulasi peningkatan mutu di setiap kab/kota dan provinsi kepulauan riau

SIPUT GONGGONG

“Strategi Implementasi Peningkatan Mutu Pendidikan secara Bergotong Royong”

Perda 9/2010 jo 10/2017 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

Rancangan Perwako (PSP, KM)

Perda 3/2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar

Rancangan Perwako (PSP, KM)

Perda 3/2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Implementasi Merdeka Belajar Psl. 121-123 (PGP); Psl. 132-135 (PSP); Psl. 136-137 (AN)

Perda 2/2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Pergub 35/2022 tentang PSP

Perda 1/2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Proses revisi Perda (PSP, KM)

Perda 1/2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Proses revisi Perda (PSP, KM)

Perda 3/2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

Proses revisi Perda (PSP, KM)

Perda 7/2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Proses revisi Perda (PSP, KM)



2.



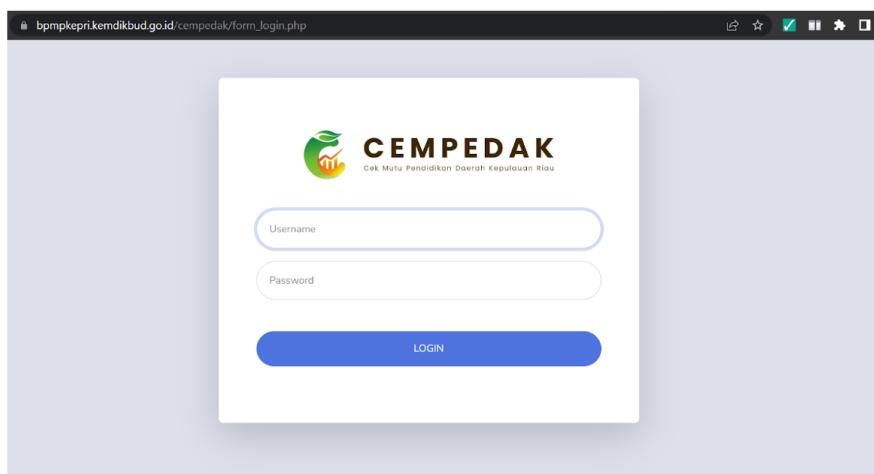
Aplikasi cek mutu pendidikan daerah kepulauan riau (Cempedak)

Aplikasi yang mengintegrasikan Profil dan Rapor Pendidikan dengan indikator kinerja urusan pendidikan pada Standar pelayanan minimal pemerintah daerah berdasarkan Permendagri 59 tahun 2021 beserta rekemendasi kegiatan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021.

Manfaat aplikasi Cempedak

1. membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi permasalahan urusan pendidikan berdasarkan profil pendidikan daerah
2. membantu pemerintah daerah dalam mencari akar masalah dari setiap permasalahan urusan pendidikan
3. membantu pemerintah daerah dalam menentukan prioritas program dan kegiatan dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal pemerintah daerah.

Aplikasi Cempedak telah dimanfaatkan oleh seluruh pemerintah daerah kab/kota dan provinsi kepulauan riau.



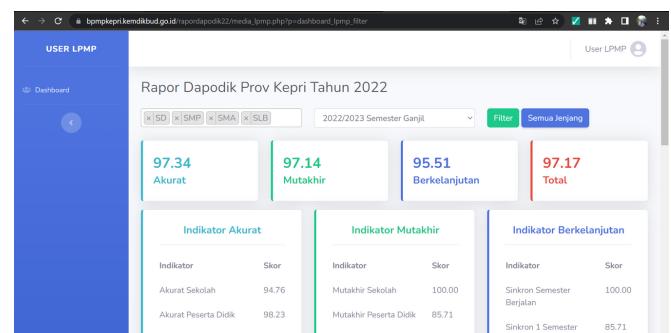
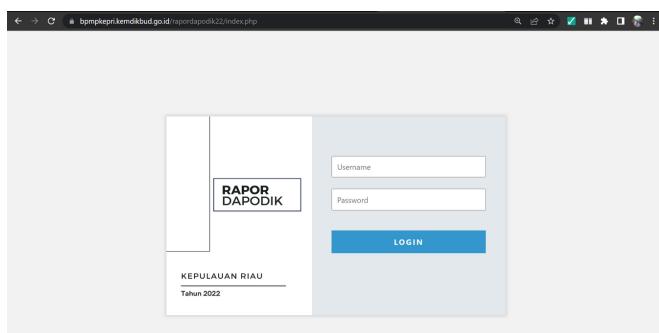
3. rapodik

Aplikasi Rapor Dapodik

Aplikasi Rapor Dapodik merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk membantu pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam mengidentifikasi kualitas data pokok pendidikan. Aplikasi ini merupakan pengembangan dari aplikasi rapor dapodik yang dikembangkan oleh pusat, dengan menambahkan berbagai fitur sehingga dapat diakses oleh pemerintah daerah dan satuan pendidikan detail sampai capaian nilai per butir indikator. Sehingga dapat ditindaklanjuti untuk ditingkatkan kualitas datanya dengan memperbaiki capaian indikator yang masih rendah.

Dampak : Pemerintah daerah dapat menggunakan DAPODIK yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan sebagai bahan perencanaan peningkatan mutu Pendidikan di daerah

Kelebihan Aplikasi Rapor Dapodik yang dikembangkan Oleh BPMP Prov. Kepri



Aplikasi Rapor Dapodik

Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

Ketercapaian Sasaran Program terkait meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau ditandai dengan peningkatan nilai/predikat SAKIP BPMP Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 sebesar 83,05 dengan predikat A. Selain itu, peningkatan tata kelola BPMP Provinsi Kepulauan Riau juga ditandai dengan diperolehnya predikat ZI/WBK pada tahun 2022. Ketercapaian sasaran program tersebut didukung oleh 2 Indikator Kinerja Program. Adapun tingkat ketercapaian dari masing-masing Indikator Kinerja Program adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Kegiatan 2.1

Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (oriented result government).

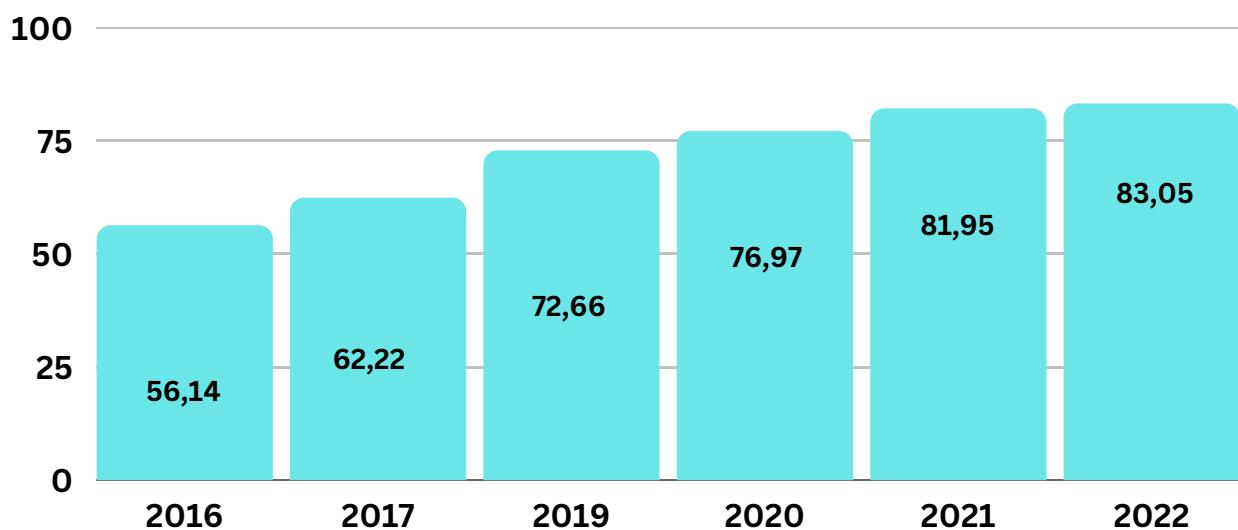


Cara perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan

Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Nilai SAKIP = [Perencanaan Kinerja] + [Pengukuran Kinerja] + [Pelaporan Kinerja] + [Evaluasi Kinerja]

Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya beserta penjelasan Indikator Kinerja Kegiatan



Catatan: Tahun 2018 ditiadakan karena adanya perubahan penyebutan nilai SAKIP.

Linimasa Kegiatan Pemenuhan SAKIP

Agustus

Evaluasi Mandiri SAKIP dengan nilai 73,55 predikat BB

Penyusunan Rencana SKP Pegawai
Penyusunan Revisi Renstra 2020-2024

Rapat Evaluasi Capaian Output Kegiatan

Revisi Renaksi
Rapat Evaluasi Capaian Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Triwulan III TA 2022 serta penyusunan jadwal Kegiatan di Triwulan IV

November

Revisi POS Pengumpulan Data Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja

Rapat Evaluasi Capaian Output Kegiatan

Juni

Rapat Evaluasi Capaian Output Kegiatan

Rapat Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan TA 2021 serta Penyusunan Rencana Kinerja TA 2022

Mei

Juli

September

Penyusunan Dokumen Tindak Lanjut LHE Mandiri SAKIP 2022

Rapat Evaluasi Capaian Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Triwulan II TA 2022 serta penyusunan jadwal Kegiatan di Triwulan III

Desember

Penyusunan PK Akhir Kinerja dan Rencana Aksi Triwulan IV TA 2022

Oktober

Maret

Penyusunan Rencana Aksi TA 2022
Rapat Evaluasi Capaian Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Triwulan I TA 2022 serta penyusunan jadwal Kegiatan di Triwulan II

April

Penyusunan Rencana Aksi TA 2022
Rapat Evaluasi Capaian Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Triwulan I TA 2022 serta penyusunan jadwal Kegiatan di Triwulan II

Februari

Rapat Evaluasi Capaian Output Kegiatan

Kegiatan Pemenuhan SAKIP

1

Perencanaan Kinerja

Keterlibatan pimpinan dan SDM LPMP dalam penyusunan rencana kinerja

Menyusun dan mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja lembaga dan pegawai

2

Pengukuran Kinerja

Pelaksanaan rapat pencapaian kinerja setiap bulan dan triwulan dan didokumentasikan di aplikasi spasikita

3

Pelaporan Kinerja

Penyusunan laporan kinerja dan laporan keuangan secara akurat dan tepat waktu

4

Evaluasi Kinerja

Rapat koordinasi dan evaluasi kegiatan yang tidak hanya fokus pada penyerapan anggaran tetapi sampai pada evaluasi capaian target kinerj



Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Upaya Pencapaian ZI WBK



Inovasi aplikasi BPMP



Serasan

Sistem Informasi Registrasi Kegiatan

Sistem administrasi kegiatan yang lebih efektif dan efisien



Sempena

Sistem Informasi Pelayanan Masyarakat

Integrasi Layanan ULT dari 4 kantor, yaitu BPMP Prov. Kepulauan Riau, Kantor Bahasa, BAN S/M Prov. Kepulauan Riau, dan BAN PAUD PNF Prov. Kepulauan Riau



Selayar

Sistem Informasi Logbook Harian PPNPN BPMP Provinsi Kepulauan Riau

Untuk memonitoring dan bahan evaluasi pemberian reward dan punishment PPNPN



Sitensip

Sistem Informasi Kompetensi Pegawai

database pengembangan kompetensi pegawai



Cemedak

Cek Mutu Pendidikan Daerah Kepulauan Riau

Aplikasi yang mengintegrasikan Profil dan Rapor Pendidikan dengan indikator kinerja urusan pendidikan pada Standar pelayanan minimal pemerintah daerah berdasarkan Permendagri 59 tahun 2021 beserta rekemendasi kegiatan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021

Peningkatan pelayanan dalam penggunaan dan layanan fasilitas BPMP Provinsi Kepulauan Riau

1. BAN S/M, BAN PAUD, Kantor Bahasa, dan BGP Provinsi Kepulauan Riau yang berkantor di lingkungan BPMP Provinsi Kepulauan Riau
2. Asrama untuk karantina pasien covid 19

PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)

Jumlah Pendapatan untuk tahun anggaran 2022 Rp. 59.050.000. Pendapatan tersebut terdiri dari:

1. **Sewa Gedung Aula MUI Kab Bintan** dengan biaya sewa sebesar Rp. 1.500.000,
2. **Sewa Aula dan Asrama Oleh Yayasan Peduli Kepulauan Indonesia YPKI Bintan (P3G)** dengan biaya sewa sebesar Rp. 12.900.000,
3. **Sewa Lab. Komputer oleh Bawaslu** dengan biaya sewa sebesar Rp. 4.000.000,
4. Sewa Aula dan Asrama oleh YPKI Kab. Bintan dengan biaya sewa sebesar Rp. 11.100.000,
5. **Sewa Asrama, Ruang Kelas, Aula oleh BPSDM Prov. Kepri** dengan biaya sewa sebesar Rp. 2.450.000,
6. **Sewa Ruang Kelas dan Ruang Makan oleh BPSDM Prov. Kepri** dengan biaya sewa sebesar Rp. 6.000.000,
7. **Sewa Ruang Kelas dan Asrama oleh BPSDM Prov. Kepri** dengan biaya sewa sebesar Rp. 17.100.000,
8. **Sewa Lab Komputer oleh KPU Bintan** dengan biaya sewa sebesar Rp. 4.000.000



Pemberian Reward dan Punishment



**Pemberian Piagam
Penghargaan Kepada tim
SAKIP atas Capaian Nilai A**



**Pemberian Piagam
Penghargaan Tim SINDE atas
Capaian Nilai Sinde 100%**



**Pemberian Piagam
Penghargaan Tim Belajar.id
atas Capaian Provinsi Jawara
Belajar.id**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**
Jalan Tata Bumi Km 20, Ceruk Ijuk, Tanjung, Bintan, Kepulauan Riau 29125
Laman: lpmprkepri.kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR : 080 /C7.9/KP.04.00/2022

TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI
KEPADATIM SAKIP, TIM AKUN BELAJAR.ID DAN TIM SINDE
DLINGKUNGANSBALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan produktifitas dan kinerja pegawai, perlu memberikan penghargaan kepada pegawai atas prestatinya di lingkungan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Di Lingkungan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 11 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan;



**SK Pemberian Penghargaan
Kepada Pegawai**

**Pemberian Piagam
Penghargaan kepada petugas
ULT Terbaik**

Kendala Pencapaian IKK

Nilai Evaluasi dan Nilai Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi yang kurang maksimal

Upaya Antisipasi/Solusi

1. Pembuatan Aplikasi Serasan untuk memonitor kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di BPMP dalam upaya pencapaian kinerja
2. Pelaksanaan Rapat Rutin (triwulan) untuk mengetahui pencapaian kinerja dan sebagai bahan evaluasi perbaikan

Dampak

Terwujudnya tata kelola BPMP Provinsi Kepulauan Riau yang berkualitas

Pencapaian Sasaran Kegiatan

Meningkatnya tata Kelola BPMP Provinsi Kepulauan Riau



Indikator Kinerja Kegiatan 2.2

Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga.

Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Berdasarkan PMK Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

Cara perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan

Untuk Menghitung nilai kinerja anggaran dan pelaksanaan RKA-K/L, digunakan rumus berikut ini:

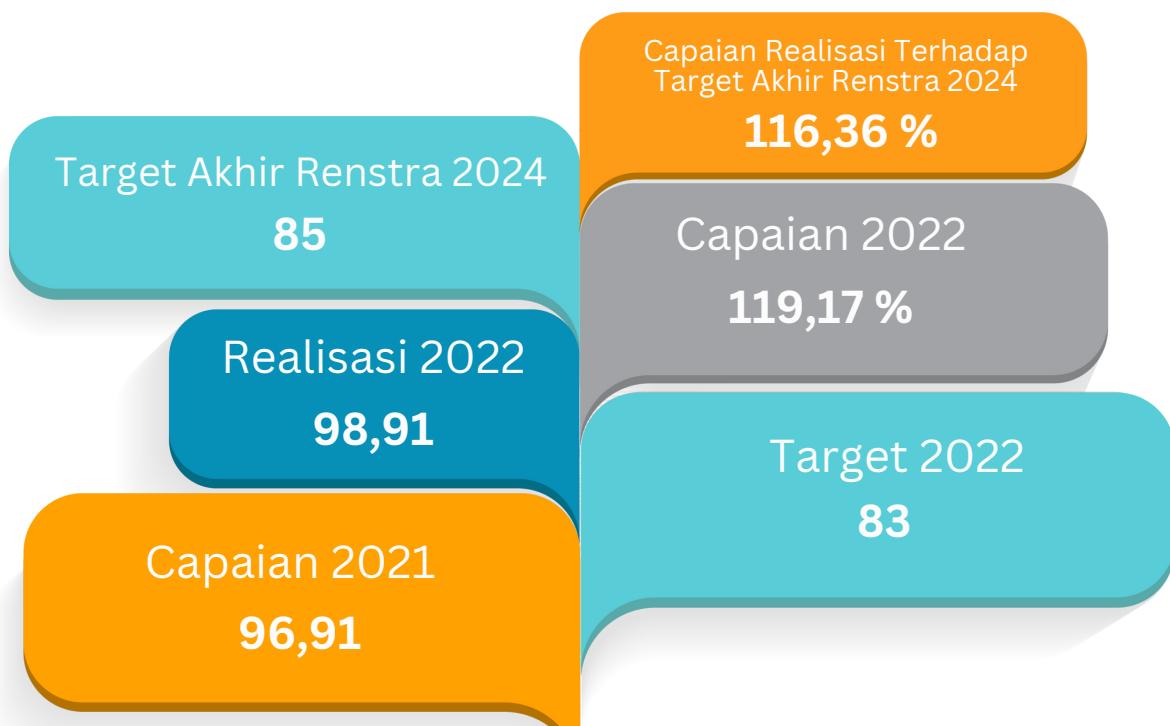
$$\text{Nilai Kinerja Anggaran} = [60\% \times \text{Nilai EKA}] + [40\% \times \text{Nilai IKPA}]$$

Nilai EKA diambil dari aplikasi SMART DJA.

Nilai IKPA diambil dari aplikasi Online Monitoring Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OM-SPAN).



Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun berjalan dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya beserta penjelasan Indikator Kinerja Kegiatan



Besaran anggaran mengambil baseline anggaran layanan perkantoran dan layanan sarana internal pada program dukungan manajemen dengan realisasi sebagai berikut:



**Realisasi Anggaran
99,68%**
layanan perkantoran



**Realisasi Anggaran
100%**
layanan sarana
internal



Anggaran tersebut digunakan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan, Operasional dan Pemeliharaan Kantor, serta Belanja Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor dan Alat Pengolah data. Selain itu, dalam pencapaian nilai IKPA dan EKA yang optimal dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Perencanaan pelaksanaan kegiatan yang terkoordinir;
2. Penyesuaian anggaran dengan kegiatan yang akan dilaksanakan melalui revisi anggaran dengan konsultasi dan koordinasi dengan Eselon I dan Kanwil DJPb;
3. Pemantauan dan Evaluasi kegiatan yang berkelanjutan;
4. Pengelolaan keuangan dan Kepegawaian sesuai peraturan yang berlaku.



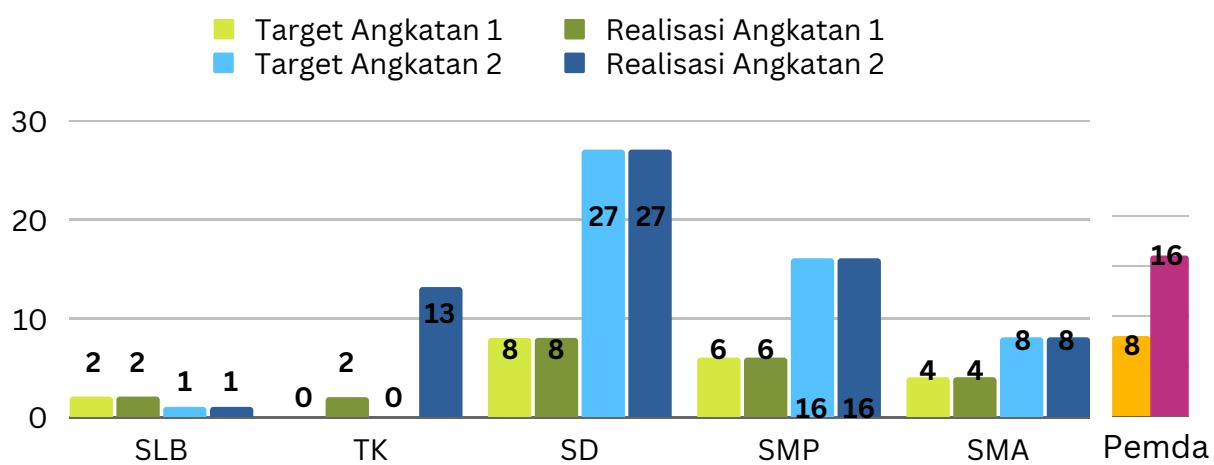
Realisasi Anggaran

Capaian Anggaran

Pagu anggaran Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dalam DIPA tahun 2022 sebesar Rp. 17.518.372.000 Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar 17.468.610.482 dengan persentase daya serap sebesar 99,72%. Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja kegiatan. Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja kegiatan.

Efisiensi Anggaran

Pada tahun 2022, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp.49.761.518 atau sebesar 0,28% dari pagu anggaran Rp 17.518.372.000. Hasil efisiensi tersebut merupakan sisa-sisa anggaran kegiatan. Pada Bulan Februari 2022 BPMP Provinsi Kepulauan Riau memperoleh tambahan anggaran sebesar Rp 1.374.812.000 dalam rangka pelaksanaan pendampingan program sekolah penggerak akan tetapi pada Bulan Oktober dan Desember dilakukan refocussing anggaran dengan memindahkan anggaran ke BA BUN dengan total realokasi sebesar Rp 543.108.000. Selain itu, dengan melakukan penghematan anggaran tersebut, BPMP Provinsi Kepulauan Riau telah melampaui target sasaran kegiatan sebagai berikut:



Target awal terdiri dari Sekolah Pelaksana PSP Angkatan 1 dan 2 jenjang SD, SMP, dan SMA serta Pemda yang terdiri dari 8 Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi akan tetapi realisasinya terdapat tambahan Sekolah Pelaksana PSP Angkatan 1 dan 2 jenjang TK serta 8 Bappeda tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi.

Penghargaan

Pada tahun 2022, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan penghargaan :

1. Unit Kerja Berpredikat ZI WBK Internal Kemendikbud tahun 2022 dengan nilai 93,96



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI

INSPEKTORAT JENDERAL
Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270
Telepon 021 - 5773134
Laman: www.ijen.kemendikbud.go.id

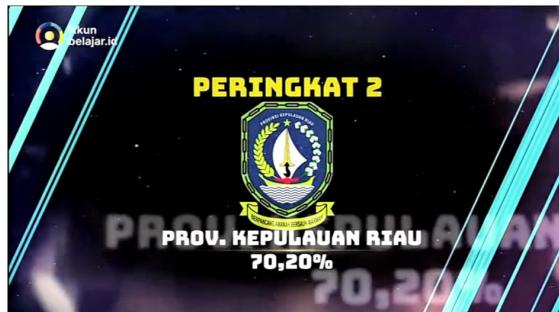
Nomor : 11887/G.OT.01.06/2022
Tgl. : 23 November 2022.
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyerahan Hasil Penilaian TPI pada Calon Unit Kerja Berpredikat ZI WBK Internal Kemendikbudristek Th 2022

Yth: Sekretaris Jenderal
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Nomor 45417/A.A4/OT.01.05/2022 tanggal 7 Juli 2022
Hal Penilaian Internal Unit Kerja Berpredikat ZI-WBK Tahun 2022 dan sesuai Surat Edaran
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2022 tentang
Pengawas Unit Kerja Berpredikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi

4.	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bangka Belitung	90,37	Lulus	
5.	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bengkulu	77,27	Tidak Lulus	Terdapat 2 (dua) komponen pengangkit pada LKE yang belum memenuhi standar nilai
6.	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Gorontalo	87,06	Tidak Lulus	Disk. Evaluasi dan Hasil Survei Tidak Lulus
7.	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan	93,32	Lulus	
8.	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur	87,51	Tidak Lulus	Terdapat 1 (satu) komponen pengangkit pada LKE yang belum memenuhi standar nilai
9.	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah	76,11	Tidak Lulus	Terdapat 4 (empat) komponen pengangkit pada LKE yang belum memenuhi standar nilai
10.	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	93,96	Lulus	
11.	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat	79,32	Tidak Lulus	Terdapat 7 (tujuh) komponen hasil pada LKE yang belum memenuhi standar nilai
12.	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah	88,42	Tidak Lulus	Tidak Lulus observasi lapangan
13.	Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara	81,08	Lulus	

Peringkat 2 jawara Belajar.id dengan nilai 70,20% yang diselenggarakan oleh Pusdatin dan REFO



Kota Batam dan Kabupaten Karimun masing-masing memperoleh **peringkat 5** dan **56 untuk Daerah Jawara belajar.id** Kategori 80 daerah fokus belajar.id

Berdasarkan perihal surat jurnalan aktifitas akun **belajar.id** periode 1 Juli - 11 November 2022, dengan ini kami mengumumkan telah terpilih sebanyak **80 perwakilan daerah fokus belajar.id** :

No	Kota / Kabupaten	Provinsi	Total Aktivasi
1	Kab. Cirebon	Prov. Jawa Barat	67,221
2	Kota Medan	Prov. Sumatera Utara	39,021
3	Kab. Labuhan Batu Utara	Prov. Sumatera Utara	37,767
4	Kab. Banyumas	Prov. Jawa Tengah	36,350
5	Kota Batam	Prov. Kepulauan Riau	34,751
6	Kab. Cianjur	Prov. Jawa Barat	28,570
7	Kab. Serdang Bedagai	Prov. Sumatera Utara	26,486
8	Kab. Sragen	Prov. Jawa Tengah	25,047
9	Kab. Sukoharjo	Prov. Jawa Tengah	22,136

No	Kota / Kabupaten	Provinsi	Total Aktivasi
51	Kab. Barru	Prov. Sulawesi Selatan	7,728
52	Kab. Sampang	Prov. Jawa Timur	7,726
53	Kab. Samosir	Prov. Sumatera Utara	7,713
54	Kab. Batubara	Prov. Sumatera Utara	7,563
55	Kab. Demak	Prov. Jawa Tengah	7,388
56	Kab. Karimun	Prov. Kepulauan Riau	7,370
57	Kab. Magelang	Prov. Jawa Tengah	7,300
58	Kab. Soppeng	Prov. Sulawesi Selatan	7,283
59	Kab. Labuhan Batu Selatan	Prov. Sumatera Utara	7,281
60	Kota Pekalongan	Prov. Jawa Tengah	7,194
	Kab. Labuhan	Prov. Sumatera	



Program Crosscutting / Collaborative Pada tahun 2022

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau melakukan program crosscutting /collaborative dengan pihak-pihak yang terkait, adapun nama programnya sebagai berikut:

Program	Pihak	Peran	Dampak	Bukti
Merdeka Belajar eps 7	Ditjen PAUDDasmen	Penetapan SK Sekolah Penggerak	Penerbitan SK Penerima BOS/P Kinerja	SK Sekolah Penggerak dan SK Penerima BOS/P Kinerja
BPMP - melakukan sosialisasi dan mendampingi proses pendaftaran serta mengawal implementasi PSP di provinsi Kepulauan Riau	Ditjen GTK	Melaksanakan seleksi calon kepala sekolah pada program sekolah penggerak	Terpilihnya SDM yang berkompeten sebagai kepala sekolah penggerak	Aplikasi Seleksi Calon Kepala Sekolah pada Program Sekolah Penggerak
	BGP	sebagai koordinator fasilitator PSP	pendampingan konsultatif dan asimetris	Aplikasi Pendampingan PSP
	Dinas Pendidikan Kab/Kota/Provinsi	Melakukan pleno kelulusan kepala sekolah penggerak Mendapatkan pendampingan konsultatif dan asimetris oleh Kemendikbudristek terkait program sekolah penggerak	Terpilihnya SDM yang berkompeten sebagai kepala sekolah penggerak	Berita Acara Pleno Kelulusan Kepala Sekolah Penggerak
Merdeka Belajar eps 15 (Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar)	Ditjen PAUD Dasmen/ Dit SMK	1. Membangun kerja sama dengan mitra pembangunan (yang sudah memiliki pendanaan mandiri dan MoU dengan daerah) untuk IKM 2. Melakukan sosialisasi IKM utk disdik 3. Melakukan bimtek awal komunitas belajar dan mitra pembangunan 4. Menyediakan pusat layanan bantuan (helpdesk)	1. MoU dengan mitra pembangunan 2. Tersampaikannya informasi dan strategi IKM jalur mandiri 3. Tersedianya pusat layanan bantuan (helpdesk)	1. MoU dengan mitra pembangunan 2. nomor pusat layanan bantuan
BPMP 1. Melakukan koordinasi dengan mitra dan disdik 2. Melakukan pertemuan koordinasi berkala dengan disdik dan mitra	BSKAP	1. Menyediaan platform pendaftaran IKM Jalur Mandiri 2. Menetapkan sekolah pelaksana IKM Jalur Mandiri 3. Melakukan monitoring dan	1. Ditetapkannya 654 sekolah sasaran IKM Jalur Mandiri di Kepulauan Riau 2. Terpantauanya proses transformasi pembelajaran	SK Penetapan Sekolah Pelaksana Kurikulum Merdeka Jalur Mandiri

Program	Pihak	Peran	Dampak	Bukti
		evaluasi transformasi pembelajaran		
	Disdik (kab/ kota/ provinsi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memantau dan mendampingi satuan pendidikan IKM 2. Melakukan koordinasi dengan mitra pembangunan 3. Mendata, mendorong dan menggiatkan komunitas belajar IKM 4. Memastikan adanya kebijakan terkait implementasi kurikulum di daerah 5. Melakukan pengelolaan Narasumber 6. Mendukung implementasi dengan sarana perlengkapan belajar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adoption rate PMM 100% 2. Terbentuknya 529 komunitas belajar yang merupakan motor penggerak IKM dan PMM 3. Disusunnya 3 peraturan daerah yang mendukung implementasi Kurikulum Merdeka 4. Tersedianya dukungan anggaran untuk implementasi Kurikulum Merdeka 	Peraturan Daerah yang mendukung implementasi Kurikulum Merdeka
	BGP Provinsi Kepulauan Riau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kolaborasi dalam penanganan isu-isu implementasi kurikulum merdeka 2. menangani pelatihan dan penguatan pemberdayaan komunitas belajar, narasumber berbagi praktik baik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan isu di daerah 2. Peningkatan adoption rate 3. Peningkatan jumlah komunitas belajar di Provinsi Kepulauan Riau 4. Transformasi proses pembelajaran melalui pengimbangan narasumber berbagi praktik baik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Platform Merdeka Mengajar 2. Data adoption rate PMM 3. Data aktivitas berwebinar komunitas belajar
	Komunitas Belajar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadi tempat kepala sekolah, guru, dan pengawas untuk belajar bersama memahami IKM 2. Menjadi tempat berbagi praktik baik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terciptanya pembelajaran yang berdiferensiasi dan berpusat pada siswa 2. terlaksakannya asesmen awal 	Adoption rate PMM

Program	Pihak	Peran	Dampak	Bukti
		dan mengkonfirmasi pemahaman IKM	3. meningkatnya adoption rate pada PMM	
Merdeka Belajar eps 1 (AN) BPMP - melakukan sosialisasi dan mengawal pelaksanaan asesmen nasional	Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan	Menyusun regulasi pelaksanaan Asesmen Nasional	Pelaksanaan Asesmen Nasional dapat berjalan dengan optimal	Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Asesmen Nasional Tahun 2022
	Setditjen PAUDDasmen	Melakukan sosialisasi AN kepada UPT dan Dinas Pendidikan serta melakukan koordinasi persiapan pelaksanaan AN dengan UPT	Pelaksanaan AN berjalan sesuai dengan POS AN	Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Asesmen Nasional Tahun 2022
	Dinas Pendidikan Kab/Kota/Provinsi	Melakukan sosialisasi, pelatihan tim teknis/proktor, monitoring dan evaluasi pelaksanaan AN,	Pelaksanaan AN berjalan sesuai dengan POS AN	<ul style="list-style-type: none"> SK Tim AN tingkat Kab/Kota dan Provinsi
Merdeka Belajar eps 19 Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data BPMP - memastikan SPM Bidang Pendidikan terimplementasikan dengan baik di daerah	Setditjen	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan bimbingan teknis perencanaan berbasis data kepada UPT Penyedia layanan helpdesk 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya pemahaman SDM UPT terkait Perencanaan Berbasis Data Kemudahan layanan konsultasi 	<ul style="list-style-type: none"> Foto Kegiatan Tangkap layar tautan layanan helpdesk
	Pemda	pemanfaatan rapor pendidikan dalam penyusunan RKPD	Pemenuhan SPM urusan pendidikan di daerah	Berita Acara Pengisian e-rakortek
Pendampingan Dana Alokasi Khusus (Merdeka Belajar Eps 3) BPMP - membentuk satgas pendampingan kebijakan DAK dengan tugas melakukan monitoring dan analisis serta mendampingi pemda dalam implementasi dana DAK	Setditjen PAUDDasmen	menyusun sistem pemantauan DAK dan melakukan koordinasi proses pendampingan dan monev	Pelaksanaan DAK sesuai dengan regulasi	Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor: 6371/C1/Pr.07.05/2022 tentang Penetapan Tim Satuan Tugas Pendampingan Kebijakan Transfer Daerah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
	Dinas Pendidikan Kab/Kota/Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> Membentuk Tim DAK Menyusun arah kebijakan, menyusun usulan, pelaksanaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi 	Pemenuhan SPM urusan pendidikan di daerah	

Program	Pihak	Peran	Dampak	Bukti
Program Kemitraan BPMP - mengadvokasi Pemda dan stakeholder dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah	Setditjen PAUDDasmen	<ul style="list-style-type: none"> a. Memastikan transformasi UPT PDM di 34 Provinsi dimana UPT PDM menjadi duta Kebijakan Kemendikbudristek b. Memastikan program Merdeka Belajar teradvokasi pada Pemerintah daerah. c. Menggalang sumber daya mitra pembangunan, komunitas pendidikan dan masyarakat. 	UPT PDM mampu menjalankan fungsi advokasi dan pendampingan Kebijakan Merdeka Belajar	Agenda Pertemuan Mingguan Rutin (Setiap Hari Rabu)
	BAN PAUD	Penyediaan Data dan Indikator Layanan PAUD dan PNF	Fasilitasi Peningkatan Kualitas Layanan PAUD dan PNF	Notula Rapat
	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	<p>Dukungan Penguatan Program Literasi di Satuan Pendidikan, dalam bentuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan pembinaan dan pelatihan kepada Pengelola Perpustakaan Sekolah. b. Memberikan bantuan bahan pustaka dan sarana prasarana. c. Fasilitasi bentuk-bentuk kegiatan seperti pameran, lomba, seminar dan perayaan hari besar nasional/budaya/agama yang bertema literasi. 	Pembentukan dan peningkatan budaya literasi di satuan pendidikan	Notula Rapat
	Dinas Kominfo	<p>Dukungan terhadap kebijakan digitalisasi sekolah, dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemetaan lokasi/daerah satuan pendidikan yg tidak terjangkau sinyal komunikasi (<i>blank spot</i>) b. Bantuan infrastruktur/solusi fasilitasi perangkat teknologi informasi dan komunikasi 	Layanan platform-platform digitalisasi sekolah dapat diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh satuan pendidikan.	Notula Rapat
	Mitra Pembangunan	Dukungan Program dan Sumber Daya terhadap pemda dan satuan pendidikan dalam	Terbentuknya kolaborasi/kerjasama dibidang pendidikan antara Pemda/Satuan	Daftar Mitra Pembangunan

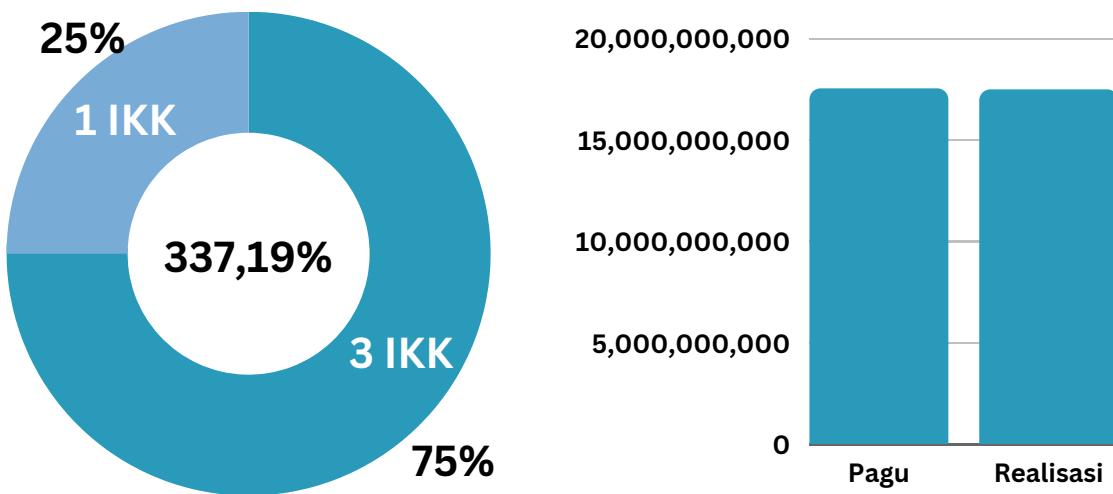
Program	Pihak	Peran	Dampak	Bukti
		mendukung desain, implementasi, dan monev kebijakan dan program prioritas Merdeka Belajar	Pendidikan dengan Mitra Pembangunan yang dapat diperluas dengan kerja sama dengan Komunitas Pendidikan, Sektor Swasta, dan Masyarakat	
	IOM	supply data terkait pengungsi anak yang ditempatkan di Kepulauan Riau	BPMP Provinsi Kepulauan Riau sebagai perpanjangan tangan Kemendikbudristek dapat mengawal dan memastikan bahwa kebijakan tentang Pendidikan Bagi Anak Pengungsi terlaksana dengan baik	dokumentasi kegiatan dalam rangka pendampingan pelaksanaan kebijakan tentang Pendidikan Bagi Anak Pengungsi
Penanganan COVID19 BPMP - menyediakan asrama (Gedung Bangunan) untuk tempat karantina pasien Covid-19	Dinas Kesehatan	Dinkes berkoordinasi terkait penggunaan gedung asrama BPMP Provinsi Kepulauan Riau untuk penanggulangan pandemi Covid19	Penanggulangan covid19	MoU penggunaan asrama

BAB IV

Penutup

Selama tahun 2022, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja kegiatan dan kinerja keuangan.

Kinerja BPMP Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 secara keseluruhan dapat dinyatakan berhasil, karena dari 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 telah mencapai target dengan capaian rata-ratanya 337,19%. Capaian tersebut turut didukung kinerja keuangan di tahun 2022 dengan penggunaan anggaran sebesar 17.468.610.438 atau 99,72% dari total pagu sebesar Rp. 17.518.372.000.



Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain :

1. Jaringan internet yang belum merata di semua wilayah/blank spot
2. hasil profil pendidikan tahun 2021 baru keluar setelah proses perencanaan di pemda berjalan
3. pemahaman pemerintah daerah dalam pemanfaatan profil pendidikan masih kurang
4. Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan masih kesulitan dalam mendekripsi tingkat kualitas data dalam dapodik
5. perubahan SOTK pada Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota yang berdampak pada perubahan tim PMO dan harus dilaksanakan sosialisasi kembali mengenai kebijakan program sekolah penggerak, serta beberapa kebijakan merdeka belajar lainnya.
6. Tidak ada dukungan anggaran dari Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan kurikulum merdeka jalur mandiri, sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan oleh daerah.

Untuk meningkatkan kinerja organisasi, beberapa fokus perbaikan yang akan dilakukan ke depan antara lain :

1. Berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait pemerataan jaringan internet, diantaranya dengan dinas pendidikan, Badan Perencanaan dan pembangunan daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika.
2. Melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan peningkatan mutu pendidikan salah satunya dengan menggunakan Surat Mendikburistik No. 16019/MPK.A/PR.07.00/2022 hal indikator kinerja urusan pendidikan kabupaten/kota tanggal 7 Maret 2022
3. Optimalisasi aplikasi Cek Mutu Pendidikan Daerah Kepulauan Riau (CEMPEDAK) untuk membantu pemerintah daerah dalam menentukan rekomendasi kegiatan dari hasil profil pendidikan daerah
4. Optimalisasi aplikasi rapor dapodik Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan kualitas Data pokok pendidikan
5. melakukan pendampingan asimetris secara berkelanjutan sesuai kebutuhan pemerintah daerah
6. mengoptimalkan advokasi dengan pemerintah daerah agar memberikan dukungan terhadap implementasi kebijakan merdeka belajar melalui penerbitan peraturan daerah dan pengalokasian anggaran.

LAPORAN KINERJA

2022



KEMENDIKBUDRISTEK
BPMP PROVINSI KEPULAUAN RIAU

LAMPIRAN





**Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Kepala LPMP Provinsi Kepulauan Riau
Dengan
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Drs. Irwan Safii, M.Pd.

Jabatan : Kepala LPMP Provinsi Kepulauan Riau

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Jumeri, S.TP.,M.Si.

Jabatan : Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Bintan, 28 Maret 2022

Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kepala LPMP Provinsi Kepulauan Riau



Jumeri, S.TP.,M.Si.



Drs. Irwan Safii, M.Pd.

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
1	[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	25.00
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	A
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	83

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp. 10.646.565.000
2	6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	Rp. 6.040.103.000
		TOTAL	Rp. 16.686.668.000

Bintan, 28 Maret 2022

**Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Menengah**

Kepala LPMP Provinsi Kepulauan Riau



Jumeri, S.TP.,M.Si.



Drs. Irwan Safii, M.Pd.



**Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Kepala BPMP Provinsi Kepulauan Riau
Dengan
Plt. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Warsita, S.S., M.Pd.

Jabatan : Kepala BPMP Provinsi Kepulauan Riau

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. Iwan Syahril, Ph.D.

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Bintan, 14 Juli 2022

**Plt. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan
Dasar dan Pendidikan Menengah**

Kepala BPMP Provinsi Kepulauan Riau



Dr. Iwan Syahril, Ph.D.



Warsita, S.S., M.Pd.

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
1	[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	0.98
		[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	25
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	A
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	83

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp. 10.646.565.000
2	6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	Rp. 6.040.103.000
		TOTAL	Rp. 16.686.668.000

Bintan, 14 Juli 2022

**Plt. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan
Dasar dan Pendidikan Menengah**

Kepala BPMP Provinsi Kepulauan Riau



Dr. Iwan Syahril, Ph.D.



Warsita, S.S., M.Pd.



**Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Kepala BPMP Provinsi Kepulauan Riau
Dengan
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Warsita, S.S., M.Pd.

Jabatan : Kepala BPMP Provinsi Kepulauan Riau

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Iwan Syahril

Jabatan : Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Bintan, 27 Desember 2022

**Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar Kepala BPMP Provinsi Kepulauan Riau,
dan Pendidikan Menengah,**



Iwan Syahril



Warsita, S.S., M.Pd.

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
1	[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen	[IKK 1.1] Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu pembelajarannya	0.98
		[IKK 1.2] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	25
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	A
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau	83

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD Dikdas Dikmen dan Dikmas	Rp. 7.051.326.000
2	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp. 10.467.046.000
		TOTAL	Rp. 17.518.372.000

Bintan,27 Desember 2022

**Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Menengah,**

Kepala BPMP Provinsi Kepulauan Riau,



Iwan Syahril



Warsita, S.S., M.Pd.

**PERNYATAAN TELAH DI REVIU
BPMP PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kami telah mereviu laporan kinerja BPMP PROVINSI KEPULAUAN RIAU untuk tahun anggaran 2022 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen BPMP PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Bintan, 31 Januari 2023

Ketua Tim Reviu



Helvira Rosalia

198806302015042001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Nomor POS	: 058/C7.34/OT.01.00/2021
Tgl. Pembuatan	: 5 Agustus 2021
Tgl. Revisi	: 4 November 2022
Tgl. Efektif	: 1 Desember 2022
Disahkan Oleh	: Kepala BPMP Kepulauan Riau  Warsita, S.S., M.Pd NIP197512042002121003
Nama POS	: POS Pengumpulan Data Kinerja

DASAR HUKUM :

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

KUALIFIKASI PELAKSANA :

- Mampu mengoperasikan komputer
- Memiliki pemahaman mengenai alur pelaporan data capaian akuntabilitas kinerja
- Memiliki pemahaman proses bisnis BPMP Provinsi Kepulauan Riau.

KETERKAITAN :

- PDK-09.04.CFM.02 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
- PDM-08.04.CFM.02 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

- PC/Laptop
- Lembar disposisi
- Lembar format data pendukung
- Dokumen pendukung

PERINGATAN :

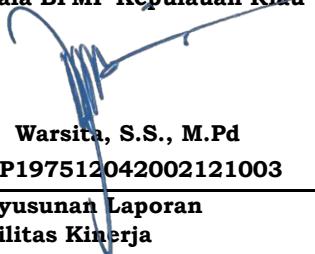
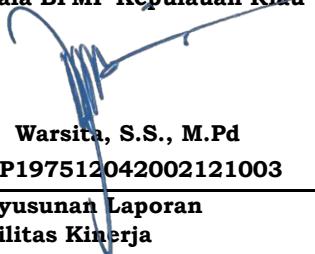
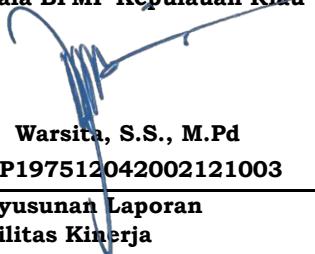
- Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan dan jika pelaksana dalam keadaan berhalangan maka dialihkan ke pelaksana lain dengan surat penugasan.
- Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan secara elektronik dan/atau manual

POS Pengumpulan Data Kinerja BPMP Provinsi Kepulauan Riau

NO	Kegiatan	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		Kepala	Kasubag Umum	Tim LAKIP	Kelompok Kerja	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Kasubag umum untuk melaporkan data capaian kinerja BPMP Provinsi Kepulauan Riau	(oval)				Lembar disposisi	15 Menit	Disposisi	
2	Menerima disposisi selanjutnya menugaskan Tim Lakip untuk memproses pelaporan data capaian kinerja					Lembar disposisi	15 Menit	Disposisi	
3	Menyiapkan dan menyampaikan format pengumpulan data dan informasi capaian kinerja masing-masing kelompok kerja.					Instrumen pengumpulan data dan informasi capaian kinerja	1 Jam	Instrumen pengumpulan data dan informasi capaian kinerja masing-masing koordinator	Perbulan atau Per 3 bulan
4	Mengisi format pengumpulan data dan informasi capaian kinerja lalu menyerahkannya kembali kepada Tim Lakip					Instrumen pengumpulan data dan informasi capaian kinerja masing-masing tim per koordinator	7 Hari	Instrumen pengumpulan data dan informasi capaian kinerja yang telah terisi dari masing-masing koordinator	Instrumen yang telah diisi diserahkan kembali kepada Tim Lakip pada hari ke 7
5	Menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi capaian kinerja yang telah terkumpul					Kumpulan data dan informasi capaian kinerja	3 Hari	Kumpulan data dan informasi capaian kinerja yang telah diolah	
6	Mengoreksi data capaian kinerja					Kumpulan data dan informasi capaian kinerja yang telah diolah	1 Hari	Kumpulan data dan informasi capaian kinerja yang telah dikoreksi oleh Kasubbag TU	
7	Menyetujui laporan data capaian kinerja					Kumpulan data dan informasi capaian kinerja yang telah dikoreksi oleh Kasubbag TU	3 Jam	Kumpulan data dan informasi capaian kinerja yang telah disetujui	
8	Dokumentasi data capaian kinerja				(oval)	Kumpulan data dan informasi capaian kinerja yang telah disetujui	2 Jam	Dokumen capaian kinerja	Capaian kinerja juga diinput melalui aplikasi spasikita

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU</p>	<table border="1"> <tr> <td>Nomor POS</td><td>: 005/C7.34/OT.01.00/2021</td></tr> <tr> <td>Tgl. Pembuatan</td><td>: 15 Agustus 2019</td></tr> <tr> <td>Tgl. Revisi</td><td>: 4 November 2022</td></tr> <tr> <td>Tgl. Efektif</td><td>: 1 Desember 2022</td></tr> <tr> <td>Disahkan Oleh</td><td>: Kepala BPMP Kepulauan Riau  Warsita, S.S., M.Pd NIP197512042002121003</td></tr> <tr> <td>Nama POS</td><td>: POS Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja</td></tr> </table>	Nomor POS	: 005/C7.34/OT.01.00/2021	Tgl. Pembuatan	: 15 Agustus 2019	Tgl. Revisi	: 4 November 2022	Tgl. Efektif	: 1 Desember 2022	Disahkan Oleh	: Kepala BPMP Kepulauan Riau  Warsita, S.S., M.Pd NIP197512042002121003	Nama POS	: POS Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Nomor POS	: 005/C7.34/OT.01.00/2021												
Tgl. Pembuatan	: 15 Agustus 2019												
Tgl. Revisi	: 4 November 2022												
Tgl. Efektif	: 1 Desember 2022												
Disahkan Oleh	: Kepala BPMP Kepulauan Riau  Warsita, S.S., M.Pd NIP197512042002121003												
Nama POS	: POS Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja												
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :												
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Republik Indoensia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 	<ol style="list-style-type: none"> Mampu mengoperasikan komputer Memiliki pemahaman mengenai alur penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Memiliki pemahaman proses bisnis BPMP Provinsi Kepulauan Riau. 												
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :												
<ol style="list-style-type: none"> PDK-09.04.CFM.02 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja PDM-08.04.CFM.02 Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 	<ol style="list-style-type: none"> PC/Laptop Lembar disposisi Lembar format data pendukung Dokumen pendukung 												
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :												
<ol style="list-style-type: none"> Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana. 	<ol style="list-style-type: none"> Dicatat dan didata dalam berkas kearsipan 												

POS Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

NO	Kegiatan	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		Kepala	Kasubag Umum	Tim LAKIP	Persuratan	Kelompok Kerja	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menginstruksikan Tim LAKIP untuk membuat surat pemberitahuan permintaan data dan informasi capaian kinerja dari setiap kelompok kerja		(Oval)					30 Menit	Lembar disposisi	
2	Mengirimkan surat pemberitahuan permintaan data dan informasi capaian kinerja.			(Dua kotak bertemu)			Surat Pemberitahuan/ Nota Dinas	30 Menit	Lembar disposisi	
3	Memberikan data/laporan program kepada tim LAKIP					(Kotak bawah)	Data Pendukung	1 Hari	Data Pendukung	
4	Menghimpun data dan informasi capaian kinerja dari kelompok kerja			(Kotak bawah)			Data Pendukung	4 Hari	Data Capaian Kinerja dari masing-masing kelompok kerja	Data dapat diberikan melalui email
5	Mengadakan rapat dengan tim LAKIP untuk menganalisa data capaian kinerja dari masing-masing koordinator			(Kotak bawah)			Ruang Pertemuan dan bahan pertemuan	3 Hari	Daftar Hadir, Notulen, dan Draft LAKIP	
6	Menyusun dokumen LAKIP LPMP Provinsi Kepulauan Riau			(Kotak bawah)			Data Pendukung	3 Hari	Draft LAKIP	
7	Mengoreksi dan memberi paraf Dokumen LAKIP		(Jawab)	(Jawab)			Draft LAKIP	60 menit	Draft LAKIP yang sudah diparaf	
8	Menyampaikan dokumen LAKIP kepada Kepala BPMP		(Jawab)				Draft LAKIP yang sudah diparaf	10 menit	Draft LAKIP yang sudah diparaf	
9	Penandatanganan dokumen LAKIP oleh Kepala		(Jawab)				Draft LAKIP yang sudah diparaf	10 menit	Draft LAKIP yang sudah ditandatangani (LAKIP Final)	
10	Membuat surat pengantar pengiriman				(Kotak bawah)		Surat Pengantar	10 menit	Dokumen	
11	Menggandakan, mengirimkan, dan mengarsipkan dokumen LAKIP				(Oval)		Dokumen	2 hari	Dokumen	



**Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN KEPULAUAN RIAU
Tahun 2022**

Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan

- Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Paham ini tidak ditandatangani secara elektronik mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh BCAE



Pengukuran Kinerja Rincian Output

No	RO / Komponen	Volume	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Anggaran
1	Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya	80.0000	Lembaga	3	12	40	103	Rp. 7.051.326.000
2	[063] Pendampingan Fasilitasi Berdasarkan SNP	46	Kegiatan	3	8	23	46	Rp. 6.838.482.000
3	[084] Verifikasi dan Validasi Data Mutu Pendidikan	6	Kegiatan	0	0	3	6	Rp. 212.844.000
4	Layanan Umum	1.0000	Layanan	0.2499	0.5	0.75	1	Rp. 375.000.000
5	[055] Pelayanan Umum Rumah Tangga dan Perlengkapan	12	Bulan	3	6	9	12	Rp. 375.000.000
6	Layanan Perkantoran	1.0000	Layanan	0.2499	0.5	0.75	2	Rp. 10.042.046.000
7	[001] Gaji dan Tunjangan	12	Bulan	3	6	9	12	Rp. 4.370.526.000
8	[002] Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12	Bulan	3	6	9	12	Rp. 5.671.520.000
9	Layanan Sarana Internal	1.0000	Unit	0	1	1	1	Rp. 50.000.000
10	[997] Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	1	Layanan	0	1	1	1	Rp. 50.000.000
TOTAL JUMLAH PAGU								Rp. 17.518.372.000

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditetapkan oleh BSrE

Bintan, 18 Januari 2023



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSfE